



**ANALISA INDIKATOR
TENAGA KERJA
KABUPATEN SIDOARJO**

2019

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

Kata Pengantar

Indikator Ketenagakerjaan “Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)” telah menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah untuk membuat kondisi ketenagakerjaan Sidoarjo lebih baik dan layak. Meski demikian, indikator TPT saja tidak cukup untuk memberi gambaran komprehensif mengenai kondisi ketenagakerjaan, tetap diperlukan indikator-indikator ketenagakerjaan yang lain sebagai pelengkap.

Kehadiran publikasi “Analisa Indikator Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019” Ini berusaha untuk menjawab kebutuhan analisis dimaksud. Dalam publikasi ini, karakteristik pekerja dan penganggur akan dianalisis lebih dalam dengan menggunakan tabel dan grafik dari berbagai sumber data agar diperoleh gambaran lebih menyeluruh. Memang tidak semua indikator ketenagakerjaan akan dibahas dalam publikasi ini, namun beberapa isu penting dalam sektor ketenagakerjaan berusaha dicakup dalam pembahasan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT atas segala rahmat dan petunjuk selama penulisan publikasi ini. Tidak ada karya yang sempurna dan luput dari kesalahan, oleh karena itu saran dan kritik membangun bagi perbaikan publikasi ini di masa depan akan diterima dengan senang hati.

Sidoarjo, Agustus 2019

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SIDOARJO**

Drs. Y. SISWOJO

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Grafik	vi
Daftar Gambar	viii
Bab 1 Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Ruang Lingkup	3
1.4. Sistematika Penyajian	3
Bab 2 Konsep dan Definisi	5
Bab 3 Kondisi Sosial Ekonomi	10
Bab 4 Siapa Yang Bekerja?	17
4.1. Jumlah Pekerja	17
4.2. Pendidikan	18
4.3. Status Pekerjaan	22
4.4. Lapangan Usaha	23
4.5. Pekerjaan Tambahan	26
4.6. Produktifitas	27
Bab 5 Profil Penganggur	30
5.1. Tren Pengangguran	30
5.2. Tingkat Pendidikan	31
5.3. Kelompok Umur	34
5.4. Tingkat Kesejahteraan	36

5.5. Pengangguran Nol Persen, Mungkinkah?	38
Bab 6 Kesimpulan	41
6.1. Kesimpulan	41
6.2. Saran	42
Daftar Pustaka.....	43
Lampiran	45

Daftar Tabel

Tabel 3.1. Distribusi Pekerja dan Penganggur menurut Tingkat Kesejahteraan, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018	16
Tabel 4.1. Nilai Rata-rata dan Standar Deviasi Tingkat Pendidikan serta Persentase Pekerja dengan Tingkat Pendidikan Kurang dan Lebih, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 dan 2018	20
Tabel 5.1. Distribusi Pekerja dan Penganggur menurut Tingkat Kesejahteraan, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018	37
Tabel 5.2. Kepemilikan Alat-alat Rumahtangga antara Pekerja dan Penganggur, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018	38

Daftar Grafik

Grafik 3.1. Distribusi PDRB menurut Lapangan Usaha, Kabupaten Sidoarjo 2010-2018 (persen)	11
Grafik 3.2. Penduduk Usia 15+ menurut Kegiatan Utama Seminggu Yang Lalu, Kabupaten Sidoarjo 2007-2018 (orang)	12
Grafik 3.3. Penduduk 15+ menurut Kegiatan Seminggu yang Lalu dan Tingkat Kesejahteraan, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018	14
Grafik 4.1. Perubahan Proporsi Pekerja terhadap Penduduk Usia Kerja, Kabupaten Sidoarjo tahun 2008 dan 2018	17
Grafik 4.2. Pekerja menurut Tingkat Pendidikan, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008-2018	18
Grafik 4.3. Pola Pekerja dengan tingkat pendidikan kurang (Kiri) atau lebih (Kanan), Kabupaten Sidoarjo tahun 2008 dan 2018 (persen)	21
Grafik 4.4. Pekerja menurut Status Pekerjaan, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008-2018 (Persen)	22
Grafik 4.5. Pekerja 15+ menurut Lapangan Usaha, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 dan 2017	24
Grafik 4.6. Persentase Pekerja Perempuan dan PDRB perkapita, Provinsi Jawa Timur Tahun 2018.....	25
Grafik 4.7. Persentase Pekerja yang Memiliki Pekerjaan Tambahan, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018	27
Grafik 4.8. Produktifitas Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013-2017	28
Grafik 5.1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Pertumbuhan Ekonomi, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008-2018	31
Grafik 5.2. Persentase Pengangguran menurut Tingkat Pendidikan, Kabupaten Sidoarjo tahun 2007 dan 2018 (persen)	32
Grafik 5.3. Utilitas Tenaga Kerja, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018	33

Grafik 5.4. Tingkat Pengangguran Terbuka Usia 15-24 tahun, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007-2018	35
Grafik 5.5. <i>Share</i> Pengangguran Usia 15-24 Tahun terhadap Total Penganggur, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007-2018	35
Grafik 5.6. Hubungan antara tingkat pengangguran dengan inflasi (kiri) dan pertumbuhan ekonomi (kanan), Kabupaten Sidoarjo tahun 2007-2018	39

Daftar Gambar

Gambar 1. Pengkategorian Penduduk menurut Kegiatan di Pasar Kerja	5
---	---

1.1. Latar Belakang

Indikator ketenagakerjaan telah menjadi salah satu kebutuhan data strategis suatu wilayah. Data ketenagakerjaan yang informatif dan mudah diakses dapat dimanfaatkan oleh banyak pihak untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh mengenai kondisi pasar dan tenaga kerja suatu daerah. Pengguna data ketenagakerjaan ini bervariasi mulai dari masyarakat awam, peneliti, akademisi, hingga pemerintah daerah. Bagi pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo, data ketenagakerjaan telah ditetapkan menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan yang telah dilakukan dan menjadi bahan perencanaan pembangunan selanjutnya.

Memahami suatu data, dalam hal ini data ketenagakerjaan, bukanlah perkara mudah. Data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mungkin mempunyai makna yang berbeda dengan persepsi masyarakat awam. Sebagai contoh, seseorang dianggap bekerja bagi sebagian besar masyarakat mungkin mengacu pada kegiatan sehari-hari, sementara bagi BPS aktifitas memperoleh/membantu memperoleh keuntungan minimal satu jam seminggu yang lalu telah dianggap bekerja. Tak pelak, mempelajari konsep dan definisi suatu data merupakan prasyarat mutlak dalam memahami suatu data.

Upaya memahami data ketenagakerjaan tidak cukup dengan mengetahui salah satu indikator saja, misalnya cuma angka pengangguran. Angka pengangguran memang masih menjadi indikator ketenagakerjaan idola semua kalangan meski kemampuannya untuk menerangkan kondisi pasar dan tenaga kerja sangat terbatas. Sebenarnya, masih banyak isu-isu lain yang belum menjadi perhatian publik, seperti kesetaraan gender di dunia kerja (*gender equality*), pekerjaan layak (*decent work*), keberlangsungan (*sustainability*), atau inklusifitas. Oleh karena itu, mengetahui dan menghafal besaran angka pengangguran saja dirasa belum cukup untuk memahami kondisi pasar tenaga kerja.

Deklarasi SDGs terbaru jelas-jelas menjadikan manusia sebagai pusat agenda (*human centered agenda*) pembangunan, termasuk bidang ketenagakerjaan. Paradigma ini mengamanatkan agar pelaksanaan pembangunan mengikutsertakan semua pihak, termasuk perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Tidak boleh ada yang tertinggal. Oleh karena itu, memahami data ketenagakerjaan yang terpilah menurut karakteristik demografi bisa menjadi upaya selanjutnya. Dengan demikian, cita-cita pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur yang ditopang oleh prinsip kesetaraan (*equality*), demokrasi (*democracy*), keberlangsungan (*sustainability*), dan hubungan sosial yang erat (*social cohesion*) dapat terwujud.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan publikasi Analisa Indikator Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 ini adalah memberikan gambaran mengenai kondisi pasar kerja dan tenaga kerja kabupaten Sidoarjo. Upaya ini dilakukan melalui analisis dan pembahasan indikator-indikator ketenagakerjaan yang dihasilkan oleh Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan oleh BPS setiap tahunnya. Dengan demikian, pengguna akan memperoleh pemahaman yang tepat mengenai indikator-indikator tersebut dan bukan hanya besaran atau persentase semata.

Tujuan penyusunan publikasi ini adalah memberikan informasi ketenagakerjaan yang informatif kepada pengguna sehingga pengguna dapat menggunakan informasi tersebut untuk pengambilan keputusan.

1.3. Ruang Lingkup

Publikasi analisis ketenagakerjaan ini menggunakan data Sakernas sebagai sumber data utama, namun untuk memperkaya dan memperkuat analisis, data-data terkait dari survei lainnya juga akan digunakan, seperti hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Indikator ketenagakerjaan yang dibahas akan dibatasi pada indikator-indikator yang telah ditetapkan oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO) yang tercantum dalam *Key Indicators on Labor Market* (KILM).

Indikator ketenagakerjaan yang terdapat pada publikasi KILM edisi sembilan (ILO, 2016) berjumlah 17 indikator. Publikasi ini hanya mencakup beberapa indikator saja, antara lain : tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), pekerja menurut status, lapangan usaha dan tingkat pendidikan, rasio antara pekerja dan penduduk usia kerja, penganggur menurut pendidikan dan kelompok umur, dan produktifitas.

Sakernas merupakan survei ketenagakerjaan yang dilakukan oleh BPS setahun dua kali pada bulan Februari dan Agustus. Sakernas Februari menghasilkan estimasi angka ketenagakerjaan tingkat provinsi saja, sementara sakernas Agustus memberikan estimasi angka ketenagakerjaan hingga tingkat kabupaten/kota. Sakernas telah dilaksanakan sejak tahun 1976, namun angka yang tersedia hingga tingkat kabupaten/kota hanya bisa dirilis sejak tahun 2007 (BPS, 2018).

1.4. Sistematika Penyajian

Publikasi Analisa Indikator Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 ini terbagi atas enam bab, yakni :

Bab I berisi latar belakang penyusunan analisis, maksud dan tujuan yang hendak dicapai dari penulisan analisis, ruang lingkup analisis, dan sistematika penyajian publikasi ini

Bab II berisi tentang konsep dan definisi ketenagakerjaan yang digunakan dalam publikasi ini. Sebagian besar konsep dan definisi bersumber dari buku pedoman pelaksanaan Sakernas dan publikasi KILM.

Bab III membahas perkembangan indikator sosial ekonomi Kabupaten Sidoarjo dari tahun ke tahun dan posisinya hingga tahun 2018. Indikator ekonomi yang dibahas adalah struktur ekonomi berdasar Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Sementara itu, indikator sosial yang dibahas adalah indikator ketenagakerjaan dalam lingkup yang luas.

Bab IV berusaha menampilkan ulasan mengenai karakteristik penduduk yang sedang bekerja di Kabupaten Sidoarjo. Tentu tidak semua karakteristik akan dibahas, namun hanya beberapa karakteristik yang telah diseleksi untuk menunjukkan permasalahan di pasar kerja.

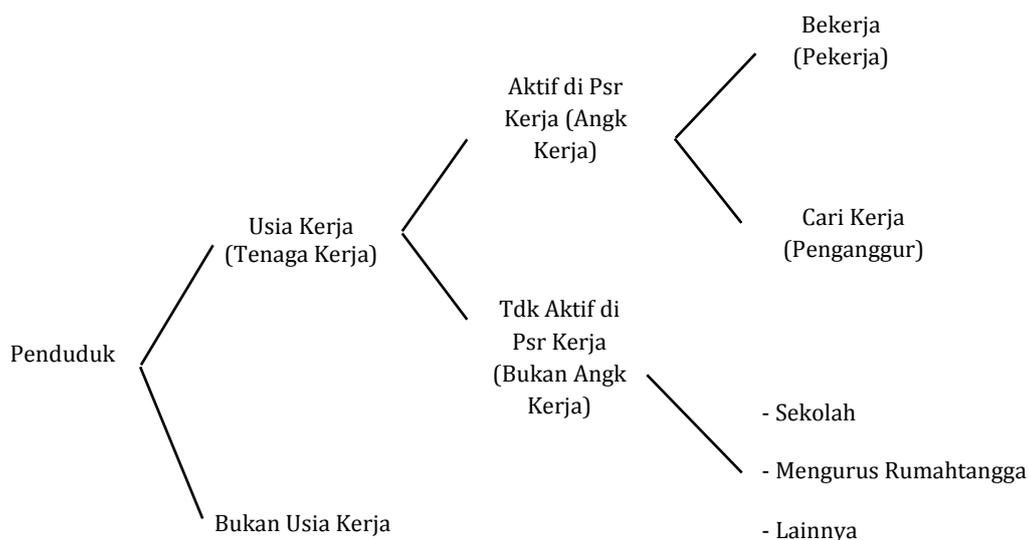
Bab V membahas karakteristik penganggur. Pengangguran telah menjadi isu sentral dalam pembahasan ketenagakerjaan, oleh karena itu beberapa karakteristik sengaja dipilih untuk mendalami isu.

Bab VI menampilkan kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan dan pilihan saran yang bisa diberikan.

2

KONSEP DAN DEFINISI

Konsep dan definisi yang digunakan dalam pengumpulan data ketenagakerjaan oleh Badan Pusat Statistik adalah *The Labor Force Concept* yang disarankan oleh *International Labor Organization* (ILO) dimana konsep ini membagi penduduk menjadi dua kelompok, yaitu : penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Selanjutnya, penduduk usia kerja dibedakan pula menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang sedang dilakukannya. Kelompok tersebut adalah penduduk yang aktif dalam pasar kerja (angkatan kerja) dan penduduk yang tidak aktif dalam pasar kerja (bukan angkatan kerja).



Gambar 1 Pengkategorian Penduduk menurut Kegiatan di Pasar Kerja (dikutip dari Priyono, 2015)

Definisi yang berkaitan dengan penerapan konsep tersebut di Indonesia dijelaskan dalam uraian berikut :

1. Penduduk Usia Kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih. Dalam gambar 1 di atas, penduduk usia kerja ini kemudian biasa disebut **tenaga kerja**. Batasan usia 15 tahun ini lebih mengacu pada konsep demografi bahwa batas

bawah penduduk usia produktif adalah 15 tahun. Karena konsep tenaga kerja hanya berkaitan dengan jumlah penduduk menurut usia, maka jumlah tenaga kerja ini akan semakin meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk, baik karena pertumbuhan penduduk alami maupun karena migrasi.

2. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Dalam gambar 1 di atas, syarat penduduk dikategorikan dalam angkatan kerja adalah mereka harus aktif dalam pasar kerja, baik sebagai pekerja maupun aktif mencari kerja. Angkatan kerja yang bekerja disebut sebagai pekerja (*employment*), sedangkan yang mencari pekerjaan disebut sebagai penganggur (*unemployment*).
3. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Dalam konsep ketenagakerjaan, kegiatan sekolah, mengurus rumahtangga, dan kegiatan lainnya, bukanlah kegiatan yang dapat dianggap sebagai aktif dalam pasar kerja.
4. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

Dalam definisi bekerja di atas, terlihat bahwa pendapatan atau keuntungan menjadi poin penting, sehingga besaran upah menjadi salah satu pertimbangan penting bagi pekerja.

5. Punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja adalah keadaan dari seseorang yang mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu sementara tidak bekerja karena berbagai sebab, seperti : sakit, cuti, menunggu masa panen, mogok kerja, dan sebagainya,
6. Pengangguran terbuka, terdiri atas :
 - a. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
 - b. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.

- c. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
- d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja

Dalam gambar 1 di atas, syarat untuk menjadi penganggur adalah masuk dalam kategori usia kerja, aktif di pasar kerja, dan tidak bekerja. Oleh karena itu, penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun tidak bisa disebut penganggur. Bahkan penduduk yang berusia lebih dari 15 tahun namun kegiatan utamanya hanya sekolah atau mengurus rumahtangga (alias tidak aktif dalam pasar kerja) juga tidak bisa dikategorikan sebagai penganggur. Hal ini juga berarti bahwa penduduk yang tidak bekerja tidak bisa serta merta dikelompokkan sebagai penganggur selama mereka tidak aktif mencari kerja.

Beberapa jenis pengangguran, antara lain :

a. Pengangguran Struktural

Pengangguran struktural terjadi karena ketidakcocokan antara penjual dan pembeli. Dalam ilmu ekonomi, pengangguran terjadi akibat tidak bertemunya permintaan (perekrut tenaga kerja/pengusaha) dan penawaran (pencari kerja) di pasar kerja.

Pemberi kerja bisa merasa tidak cocok dengan karakteristik pencari kerja, seperti tingkat pendidikan, umur, kepribadian, ketrampilan, pengalaman, dan sebagainya, dari pencari kerja. Di pihak lain, pencari kerja juga bisa tidak cocok dengan pekerjaan yang ditawarkan pemberi kerja, seperti dalam hal jenis pekerjaan yang ditawarkan atau tingkat upah yang terlalu rendah. Selain alasan rasional di atas, hal-hal yang tidak rasional juga dapat menyebabkan tidak bertemunya permintaan dan penawaran, misal tidak mau bekerja jauh dari rumah, dan lain sebagainya.

Yang termasuk dalam penyebab pengangguran struktural adalah informasi lowongan kerja yang tidak tersampaikan kepada pencari kerja .

b. Pengangguran Sukarela

Pengangguran sukarela adalah orang-orang yang secara sukarela menganggur, karena mereka menganggap upah yang ditawarkan belum terlalu baik, atau yang bersangkutan masih ingin menunggu untuk

mendapatkan pekerjaan lain dengan upah yang lebih baik, paling tidak sama dengan *reservation wage*-nya. *Reservation wage* yaitu besarnya upah minimal yang membuat pencari kerja mau bekerja.

Dengan tidak adanya tunjangan penganggur di Indonesia, maka tidak semua orang mampu menganggur. Orang miskin tidak sanggup menganggur karena menganggur berarti tidak punya penghasilan. Agar bisa bertahan hidup, mereka harus bekerja apa saja dan upah berapa saja. Sementara orang kaya mampu menjadi penganggur sukarela dengan tabungan atau aset yang dimiliki atau bantuan dari orang lain. Dengan kata lain, berlaku hipotesis “pengangguran sebagai kemewahan” yang pertama kali diungkapkan oleh Udall and Sinclair (1982) dan Myrdal (1968).

7. TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.
8. Pekerja tidak penuh adalah mereka yang bekerja dibawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Menurut akademisi bidang ketenagakerjaan, pekerja kategori ini bisa disebut sebagai setengah penganggur (*under-employment*).

Sebagian para akademisi meyakini bahwa semakin tinggi jam kerja seseorang, maka pekerja akan semakin sejahtera. Namun sebagian akademisi yang lain tidak setuju dengan alasan di atas, karena mereka mempercayai bahwa ada titik tertentu dimana jam kerja justru akan turun ketika upah naik (*backward bending supply curve*).

9. Sekolah adalah kegiatan seseorang untuk bersekolah di sekolah formal, mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi selama seminggu yang lalu sebelum pencacahan. Tidak termasuk yang sedang libur sekolah.
10. Mengurus rumah tangga adalah kegiatan seseorang yang mengurus rumah tangga tanpa mendapatkan upah, misalnya : ibu-ibu rumah tangga dan anaknya yang membantu mengurus rumah tangga. Sebaliknya pembantu rumah tangga yang mendapatkan upah walaupun pekerjaannya mengurus rumah tangga dianggap bekerja.

11. Kegiatan lainnya adalah selain kegiatan, bekerja, sekolah dan menurus rumahtangga.
12. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi suatu tingkatan sekolah dengan mendapatkan tanda tamat (ijazah).
13. Jumlah jam kerja seluruh pekerjaan adalah lamanya waktu dalam jam yang digunakan untuk bekerja dari seluruh pekerjaan.
14. Status pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan disuatu unit usaha/kegiatan. Status pekerjaan dibedakan menjadi 7 (tujuh) kategori, yaitu :
 - a. Berusaha sendiri
 - b. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar
 - c. Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar
 - d. Buruh/karyawan/pegawai
 - e. Pekerja bebas di pertanian
 - f. Pekerja bebas di non pertanian
 - g. Pekerja keluarga/tak dibayar

3

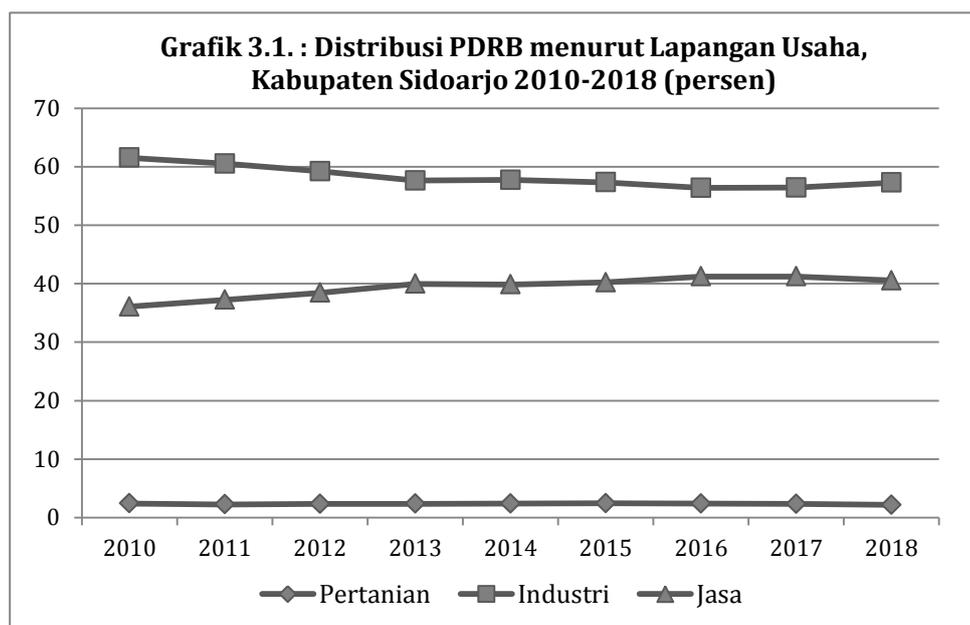
KONDISI SOSIAL EKONOMI

Publikasi ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pasar kerja di Kabupaten Sidoarjo. Pergerakan indikator ketenagakerjaan ini biasanya berkaitan erat dengan kondisi ekonomi suatu wilayah, bukan hanya di tingkat lokal namun juga regional bahkan internasional. Oleh karena itu, bab ini akan membahas perkembangan perekonomian Sidoarjo secara singkat kemudian menguraikan kondisi ketenagakerjaan secara umum.

Fenomena ketenagakerjaan tidak dapat dipisahkan dari perkembangan ekonomi. Jika perekonomian sedang tumbuh bagus, maka efeknya terhadap ketenagakerjaan bisa berupa penyerapan tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran; demikian pula sebaliknya. Dalam rentang waktu 2010-2018 perekonomian Kabupaten Sidoarjo mampu tumbuh sekitar 6,3 persen per tahun. Dengan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional tersebut, diharapkan lapangan kerja yang tercipta semakin banyak.

Secara umum perekonomian Sidoarjo masih didominasi oleh sektor industri. Perannya dalam pembentukan nilai tambah bruto tahun 2018 sebesar 57,28 persen. Meski demikian, kontribusi sektor ini terus mengalami penurunan dari 61,53 persen menjadi 57,28 persen dalam kurun waktu 2010-2018. Hal yang sama juga dialami oleh sektor pertanian dimana sumbangannya dalam perekonomian menurun dari 2,25 persen menjadi 2,17 persen pada periode yang sama (grafik 3.1). Sementara itu, kontribusi positif dan kontinu dicetak oleh sektor jasa dari 37,24 persen menjadi 40,55 persen pada periode 2010-2018.

Dalam pembangunan ekonomi, kondisi seperti di atas mungkin sesuatu yang diharapkan, dimana kontribusi sektor pertanian akan terus menurun untuk beralih ke sektor industri bahkan jasa. Dengan demikian, kesimpulan bahwa terjadi perubahan struktur ekonomi di Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dikemukakan oleh Lewis (1954) telah terbukti. Kenyataannya, transformasi ekonomi Sidoarjo mungkin telah terjadi sejak beberapa dekade lalu ketika data statistik perekonomian belum tersedia dengan baik.



Sumber : BPS, PDRB Kabupaten Sidoarjo menurut Lapangan Usaha

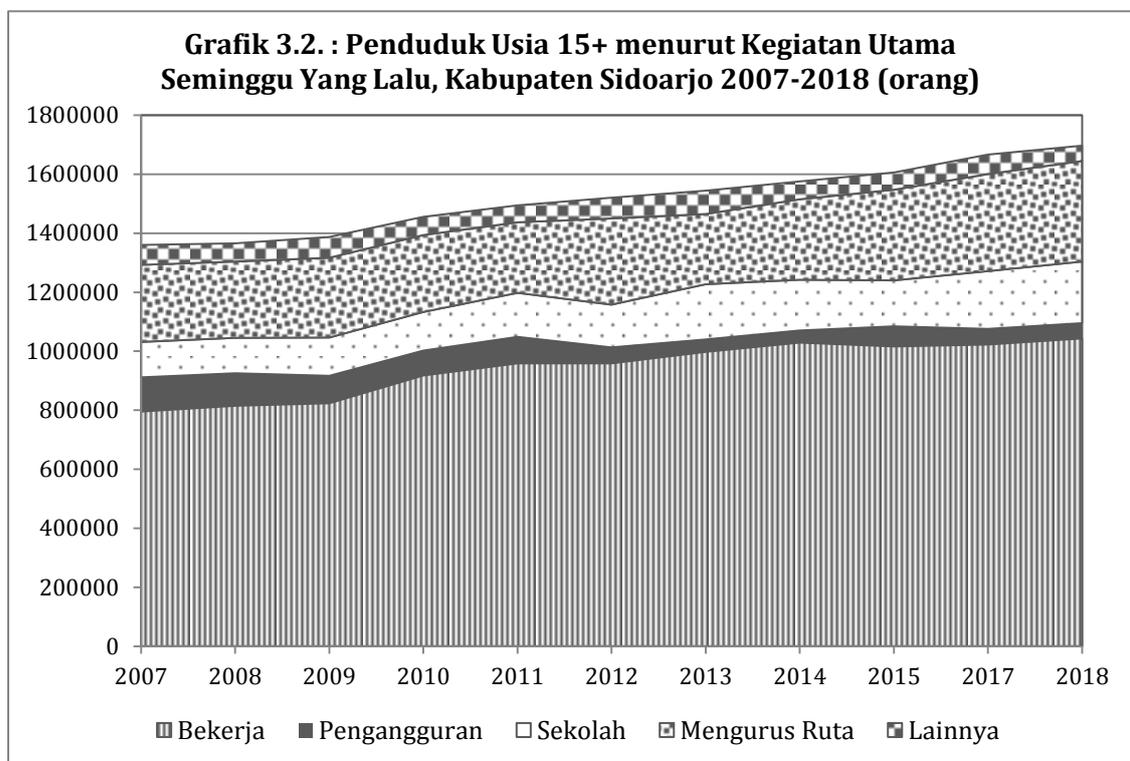
Seiring dengan besarnya kontribusi sektor industri dalam perekonomian, penyerapan tenaga kerja di sektor ini juga dominan. Dari tambahan 228 ribu tenaga kerja pada periode 2008-2018, sekitar 191 ribu diserap oleh sektor industri (84 persen). Sementara itu, sektor jasa hanya mampu menyerap 33 persen saja. Sayangnya, pada periode yang sama jumlah tenaga kerja di sektor pertanian justru berkurang 17 persen atau sekitar 39 ribu. Dengan demikian, peran sektor industri bukan hanya sebagai tumpuan pertumbuhan ekonomi, namun juga sebagai tempat mencari nafkah bagi sebagian besar masyarakat Sidoarjo.

Jenis industri manufaktur yang mendominasi di Kabupaten Sidoarjo antara lain industri makanan dan minuman, industri kertas, dan industri logam dasar. Sebagaimana diketahui, Sidoarjo terkenal dengan industri krupuknya, tempat beroperasi industri kertas PT Tjiwi Kimia, dan industri logam Aluminium PT Maspion. Sebagai konsekuensi logis dominasi sektor industri, maka performa sektor ini secara pasti akan mempengaruhi kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Sidoarjo. Jika sektor industri sedang bergairah atau lesu, maka bisa dipastikan penyerapan tenaga kerja akan meningkat atau menurun.

Geliat perekonomian Kabupaten Sidoarjo sebagian besar didorong oleh konsumsi rumahtangga (56,58 persen pada tahun 2018). Sebagaimana hukum ekonomi, jika konsumsi rumahtangga meningkat, maka perusahaan akan

meresponsnya dengan memproduksi barang dan jasa lebih banyak lagi dan mempekerjakan tenaga kerja lebih banyak lagi (Blanchard, 2017 p. 137). Pekerja atau keluarganya bisa melakukan konsumsi jika pendapatannya cukup. Oleh karena itu, mempertahankan daya beli masyarakat Sidoarjo melalui penciptaan upah yang adil bukan hanya penting secara ekonomi, tapi juga akan mendorong penyerapan tenaga kerja lebih masif.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo dalam kisaran 5-6 persen dalam satu dekade terakhir membuat jumlah pekerja terus bertambah (grafik 3.2). Ini berarti kualitas pertumbuhan ekonomi Sidoarjo masih tergolong baik karena ia ditopang oleh sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga kerja. Sebagai ilustrasi, penciptaan nilai tambah sebesar 100 miliar rupiah pada tahun 2018 membutuhkan tambahan pekerja sebanyak 11 orang. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo masih ramah terhadap penyerapan tenaga kerja. Sebagai dampak penyerapan tenaga kerja yang terus meningkat, jumlah penganggur di Kabupaten Sidoarjo juga terus berkurang.



Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2007-2018

Yang harus dipahami, permintaan tambahan tenaga kerja untuk tiap penciptaan nilai tambah tidak sama antar sektor. Pada sektor pertanian dan industri, setiap penciptaan nilai tambah sebesar 100 miliar rupiah membutuhkan tambahan pekerja masing-masing sebesar 79 orang dan 17 orang. Bahkan, sektor jasa mampu menghasilkan nilai tambah sebesar 100 miliar rupiah tanpa memerlukan tambahan tenaga kerja. Dari sini tampak bahwa sektor jasa memiliki produktivitas pekerja yang paling tinggi. Produktivitas yang tinggi ini membuahkan upah pekerja yang lebih baik, dan hal ini selanjutnya akan menarik perhatian penduduk untuk terjun ke dalam sektor tersebut.

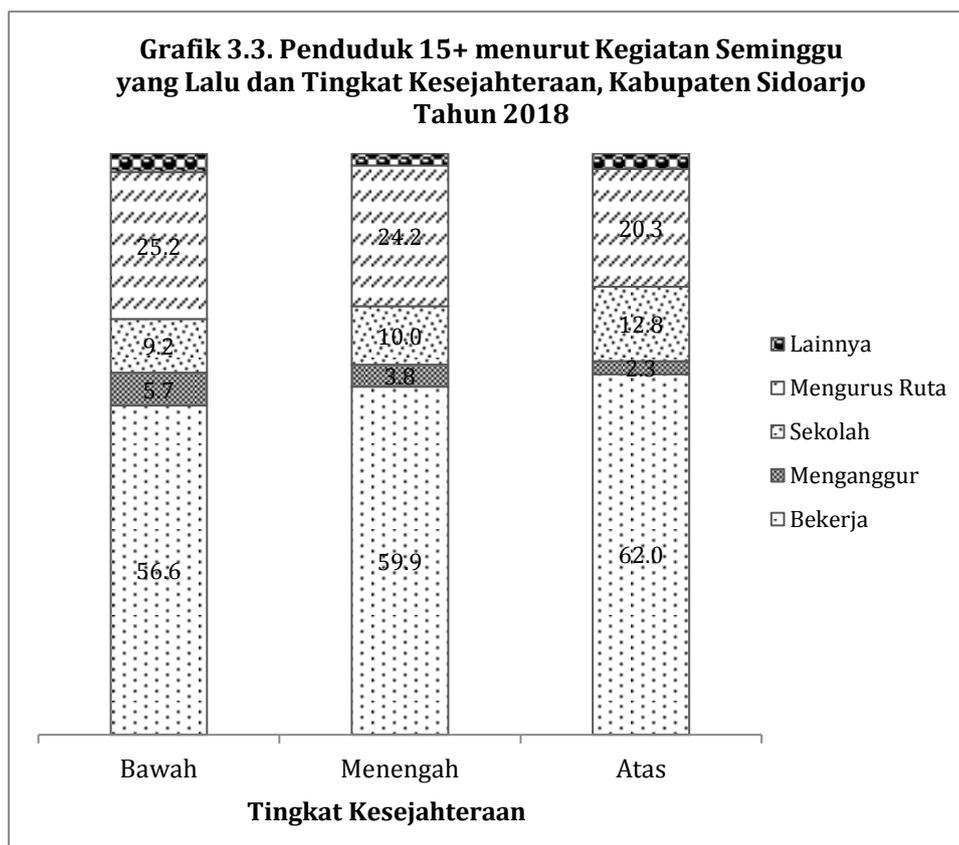
Grafik 3.2. di atas juga menunjukkan bahwa penduduk yang masih bersekolah terus meningkat dari tahun ke tahun berkat akses pendidikan yang semakin baik. Pembangunan infrastruktur, bantuan pembiayaan kepada siswa didik yang tidak mampu, dan program peningkatan mutu pendidikan memang terus digalakkan. Pada akhirnya, hal ini kemudian akan meningkatkan kualitas pekerja itu sendiri. Kualitas pekerja yang semakin baik akan meningkatkan produktivitas pekerja. Mengingat Sidoarjo sendiri telah menjadi magnet bagi pekerja migran, kualitas pekerja yang semakin baik juga akan memungkinkan mereka bersaing dengan pekerja dari daerah lain.

Memperhatikan lebih detail grafik 3.2 di atas, jumlah penduduk yang mengurus rumahtangga juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Kewaspadaan terhadap meningkatnya jumlah murid dan pengurus rumahtangga, keduanya sering disebut sebagai penduduk tidak aktif, perlu dilakukan. Jangan-jangan sebenarnya mereka ingin memasuki pasar kerja namun kondisi pasar sedang tidak mendukung. Akibatnya, anak sekolah memutuskan untuk melanjutkan pendidikan karena ia berpikir tidak akan sanggup mendapatkan pekerjaan. Yang mengurus rumahtangga juga sebenarnya ingin bekerja namun telah putus asa dalam mencari pekerjaan (*discouraged worker*).

Yang perlu diingat, perubahan komposisi penduduk berdasarkan kegiatan utamanya seminggu yang lalu ini tergantung pada beberapa faktor, antara lain : jumlah dan struktur umur penduduk, pertumbuhan penduduk, dan kesempatan kerja (Irawan, et.al, 2000). Wilayah yang didominasi oleh anak-anak dan manula akan

kekurangan tenaga kerja. Apalagi kalau peluang untuk memperoleh pekerjaan tergolong rendah. Secara nominal, besaran penduduk menurut kegiatan utama ini tergantung pada pertumbuhan penduduk. Wilayah yang mempunyai struktur penduduk tua bisa jadi tidak mengalami kekurangan tenaga kerja jika banyak pekerja luar wilayah yang bermigrasi masuk.

Kegiatan utama penduduk ternyata berbeda menurut tingkat kesejahteraan. Secara umum, sebagian besar aktifitas utama penduduk masih berkisar antara bekerja dan mengurus rumahtangga sebagai cerminan tanggung jawab masing-masing gender. Namun pola lain yang segera kelihatan adalah semakin meningkat tingkat kesejahteraan seseorang, aktifitas bekerja dan sekolah semakin meningkat (lihat grafik 3.3). Sebaliknya, semakin meningkat tingkat kesejahteraan, semakin berkurang aktifitas mengurus rumahtangga dan menganggur.



Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2018

Kenyataan ini menunjukkan bahwa penduduk berpenghasilan rendah mengalami kesulitan untuk memasuki pasar kerja. Halangan ini bisa berupa keterbatasan sumber daya manusia, ketidaksempurnaan informasi pasar kerja, dan

persyaratan administrasi yang diskriminatif. Penduduk miskin sering dihubungkan dengan kepemilikan tingkat pendidikan yang rendah pula. Oleh karena itu, ia memiliki keterbatasan pengetahuan dan ketrampilan dalam menguasai teknologi produksi terbaru. Keterbatasan akses terhadap informasi lowongan pekerjaan juga menyebabkan si miskin kesulitan memasuki pasar kerja. Belum lagi kalau lowongan pekerjaan itu menerapkan syarat administrasi yang memberatkan, misalnya kepemilikan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), SIM A/C, kendaraan pribadi, atau ijazah kursus tertentu. Semua hal tersebut menjadi penghalang bagi penduduk berpendapatan rendah untuk memasuki pasar kerja.

Demikian pula halnya dengan sekolah dan mengurus rumahtangga. Meski akses pendidikan dasar hampir setara antara si kaya dan si miskin, namun si miskin masih kesulitan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi (Sugiyarto, et.al, 2006). Jika pengusaha melihat tingkat pendidikan sebagai sinyal pengetahuan dan kecakapan dari pekerja, maka si miskin yang memiliki tingkat pendidikan rendah akan terdepak dari perhatian pengusaha. Sementara itu, rendahnya penduduk berpenghasilan tinggi untuk mengurus rumahtangga mungkin disebabkan oleh kemampuan materi untuk menggaji asisten rumahtangga atau menitipkan putra/putri ke tempat penitipan anak yang terpercaya.

Sebenarnya pasar kerja tidak bergerak mulus sebagaimana penjelasan sebelumnya, namun ia bergerak dinamis. Seseorang yang bekerja pada tahun ini belum tentu seorang pekerja setahun sebelumnya; demikian pula untuk kasus pengangguran dan mengurus rumahtangga. Menggunakan data mentah Sakernas panel rotasi tahun 2017-2018 sebagaimana tabel 3.1. berikut, terlihat bahwa penduduk keluar masuk dalam pasar kerja menjadi penduduk aktif atau tidak aktif. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan untuk meneliti karakteristik penduduk yang bergerak dinamis dalam pasar kerja ini.

Sayangnya, angka ini hanya mewakili 50 persen dari sampel Sakernas sehingga tidak bisa dibuat generalisasi. Dalam panel rotasi, sampel Sakernas akan diganti 25 persen setiap semester dan menyisakan 50 persen setiap tahunnya untuk dibuat analisis panel tingkat kabupaten. Meski demikian, tabel 3.1. berikut bisa digunakan untuk membuktikan adanya gerak keluar masuk pasar kerja.

Tabel 3.1. Distribusi Pekerja dan Penganggur menurut Tingkat Kesejahteraan, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018

		Kegiatan Utama (2018)					
	Kegiatan Utama	Bekerja	Menganggur	Sekolah	Mengurus rumahtangga	Lainnya	
Kegiatan Utama (2017)	1 Bekerja	890	26	17	85	22	1040
	2 Pengangguran	23	7	2	9	0	41
	4 Sekolah	30	11	161	10	7	219
	5 Mengurus Rumah Tangga	74	3	12	218	2	309
	6 Lainnya	4	1	0	9	2	16
		1021	48	192	331	33	1625

Sumber : Perhitungan Penulis dari Data Mentah Sakernas Tahun 2017 dan 2018

Tabel di atas memperlihatkan bahwa pada tahun 2018 dari 1.021 pekerja yang ada di Kabupaten Sidoarjo, sebanyak 890 pekerja (sekitar 87 persen) merupakan pekerja setahun sebelumnya. Sisa 13 persen pekerja tahun 2018 berasal dari penganggur (2 persen), baru lulus sekolah (3 persen), mengurus rumahtangga (7 persen), dan lainnya (1 persen). Selain itu, dari seluruh penganggur pada tahun 2017, sekitar 56 persen telah bekerja dan 17 persen masih tetap menganggur pada tahun 2018. Pergerakan dinamis dalam pasar kerja ini memberi kesulitan tersendiri dalam melakukan program *targeting* bidang ketenagakerjaan.

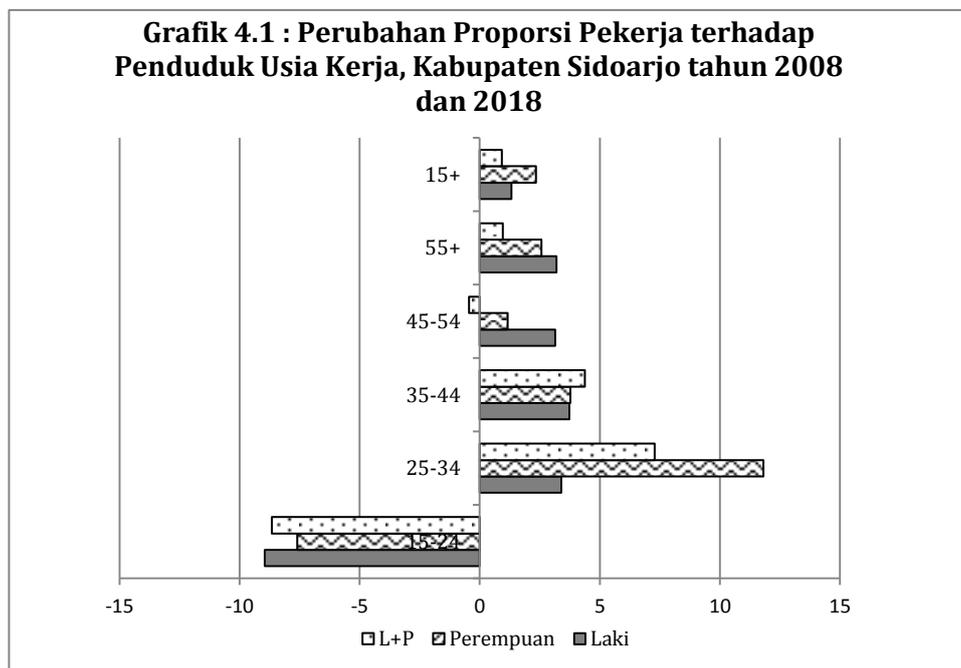
4

SIAPA YANG BEKERJA?

Publikasi ini bertujuan untuk memberi gambaran mengenai kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Sidoarjo. Bab ini akan menguraikan kondisi pekerja dalam hal jumlah, tingkat pendidikan, status pekerjaan, lapangan usaha, pekerjaan tambahan, dan produktifitas tenaga kerja.

4.1. Jumlah Pekerja

Seiring bertambahnya penduduk usia kerja, pasokan tenaga kerja di Kabupaten Sidoarjo secara otomatis juga meningkat sebagaimana terlihat pada grafik 3.1. sebelumnya. Dalam kurun waktu 2008-2018, jumlah pekerja Kabupaten Sidoarjo bertambah sebesar 228 ribu orang. Meski demikian, ada indikator yang lebih intuitif dalam menerangkan pertumbuhan jumlah pekerja, yakni proporsi pekerja terhadap penduduk usia kerja.



Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2008 dan 2018

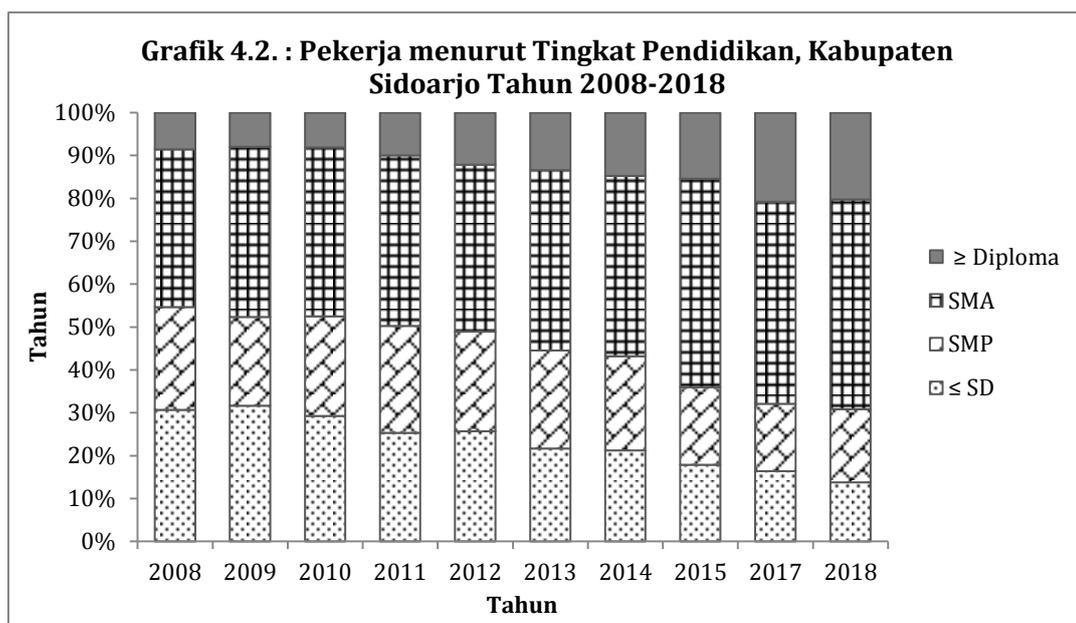
Proporsi pekerja terhadap penduduk usia kerja di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2008 sebesar 59,68 persen. Ini berarti bahwa dari 100 penduduk usia 15+ di Kabupaten Sidoarjo, 59 orang diantaranya sedang bekerja. Proporsi ini kemudian bertambah menjadi 61,48 persen pada tahun 2018. Sebenarnya, proporsi ini pernah

mencapai 65,31 persen pada tahun 2014 namun angka ini terus bergerak turun untuk tahun-tahun sesudahnya hingga mencapai 61,48 persen pada tahun 2018.

Sebagaimana terlihat pada grafik 4.1 di atas, penambahan proporsi ini tidak merata untuk setiap kelompok umur. Kelompok umur 25-34 tahun mempunyai tambahan proporsi pekerja relatif besar, sementara kelompok umur lainnya mendapat tambahan proporsi relatif lebih kecil. Bahkan, kelompok umur 15-24 mengalami penurunan proporsi pekerja sebesar 8 (delapan) persen. Di satu sisi, hal ini bisa menggambarkan keberhasilan dunia pendidikan dalam menahan siswa untuk lebih lama duduk di bangku sekolah. Namun hal ini juga bisa mengisyaratkan kesulitan pemuda dalam memasuki dunia kerja.

4.2. Pendidikan

Seiring meningkatnya angka rata-rata lama sekolah, kualitas pekerja Sidoarjo diharapkan makin meningkat. Sebagaimana diketahui, sekolah adalah tempat untuk mendapat pengetahuan dan ketrampilan. Bukan hanya ketrampilan yang bersifat kognitif, termasuk didalamnya adalah modal sosial seperti kemampuan bernegosiasi dan menghadapi publik. Oleh karena itu, tingkat pendidikan seseorang masih menjadi sinyal kuat bagi pengusaha untuk menaksir kemampuan seseorang dalam melakukan pekerjaan (*signalling*).



Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2008-2018

Pendidikan juga berperan penting dalam peningkatan karir seorang pekerja. Pekerja dengan ijazah SMA ke atas mempunyai peluang untuk menjadi tenaga teknis dan manajerial dibanding rekannya yang berijazah lebih rendah. Selain itu, pekerja ini juga berkesempatan untuk menjadi pegawai tetap dengan upah di atas UMR. Kondisi berbeda dialami pekerja yang berijazah SMP atau kurang, ia cenderung gonta-ganti pekerjaan, biasanya sebagai karyawan produksi dan pekerja pertanian, yang tidak memungkinkannya meniti jenjang karir (Allen, 2016).

Pekerja dengan pendidikan tinggi cenderung lebih produktif dibanding pekerja dengan pendidikan rendah. Penyebabnya adalah pekerja yang berpendidikan tinggi cenderung lebih mudah menguasai teknologi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi terkini. Oleh sebab itu, mereka mampu menghasilkan output lebih banyak. Dapat dikatakan, produktifitas adalah fungsi dari pendidikan (Irawan, et. al, 2000). Pekerja di Kabupaten Sidoarjo yang berasal dari lulusan SMA ke atas terus bertambah dan pekerja lulusan SMP ke bawah terus berkurang pada periode 2008-2018 sebagaimana terlihat pada grafik 4.2. Hal ini harusnya menjadi isyarat meningkatnya produktifitas pekerja di Kabupaten Sidoarjo dari waktu ke waktu.

Meningkatnya tingkat pendidikan pekerja di Sidoarjo tentu disebabkan oleh pasokan tenaga kerja yang makin terdidik. Pembangunan bidang pendidikan memang menginginkan agar penduduk dapat bersekolah lebih lama dan mencapai pendidikan tinggi. Bagi pekerja, pendidikan tinggi berfungsi sebagai sinyal untuk mendapatkan upah lebih tinggi. Tingkat pengembalian (*rate of return*) yang semakin tinggi seiring meningkatnya tingkat pendidikan juga ikut mendorong permintaan akan pendidikan tinggi di Sidoarjo.

Pendidikan yang dimiliki oleh pekerja seharusnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kalau pendidikan pekerja lebih tinggi atau lebih rendah dari kebutuhan, maka akan menimbulkan inefisiensi (ILO, 2014). Kalau pekerja terdidik bekerja di tempat yang memerlukan pendidikan lebih rendah, maka ia tidak akan mencapai kapasitas maksimalnya. Sebaliknya, jika pekerja berpendidikan rendah bekerja di tempat yang memerlukan pendidikan tinggi, maka perusahaan harus mengeluarkan biaya ekstra untuk mengadakan pelatihan.

Dalam publikasi ini, pekerja yang mempunyai pendidikan berlebih/kurang dihitung dari rata-rata lama sekolah ditambah satu standar deviasi. Teknik pengukuran ini biasanya digunakan untuk menghitung pendidikan berlebih/kurang menurut jenis jabatan, namun kali ini teknik tersebut digunakan dalam lingkup lapangan usaha. Dikatakan berpendidikan lebih (*overeducated*) jika dalam lapangan usaha yang sama, seorang pekerja mempunyai lama pendidikan lebih besar dari rata-rata ditambah satu standar deviasi. Sebaliknya, pekerja dikatakan berpendidikan kurang (*undereducated*) jika dalam lapangan usaha yang sama, seorang pekerja mempunyai lama pendidikan sebesar rata-rata dikurangi satu standar deviasi. Tabel 4.1 menunjukkan nilai rata-rata dan standar deviasi lama sekolah menurut sektor ekonomi di Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 4.1. Nilai Rata-rata dan Standar Deviasi Tingkat Pendidikan serta Persentase Pekerja dengan Tingkat Pendidikan Kurang dan Lebih, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 dan 2018

Sektor Ekonomi	2008		2018		2008 (%)		2018 (%)	
	Rata-rata	Standar Deviasi	Rata-rata	Standar Deviasi	Kurang	Lebih	Kurang	Lebih
Pertanian	6,81	2,99	8,79	3,11	65,89	12,22	6,10	35,85
Industri	10,03	2,89	11,08	2,68	20,44	5,50	10,98	9,72
Jasa	9,63	3,62	11,84	3,58	31,50	12,12	13,93	24,58

Sumber : Perhitungan Penulis, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2008 dan 2018

Secara umum, pada tahun 2008 pekerja sektor industri di Kabupaten Sidoarjo relatif lebih berpendidikan dibanding pekerja sektor lain. Satu dekade kemudian, kondisi berbalik dimana pekerja sektor jasa relatif lebih berpendidikan dibanding sektor pertanian dan sektor industri. Meski demikian, sektor jasa tetap konsisten sebagai sektor dengan variasi pendidikan yang relatif lebih lebar dibanding dua sektor lainnya. Hal ini bisa dimaklumi mengingat sektor jasa meliputi pedagang kecil hingga tenaga ahli lainnya.

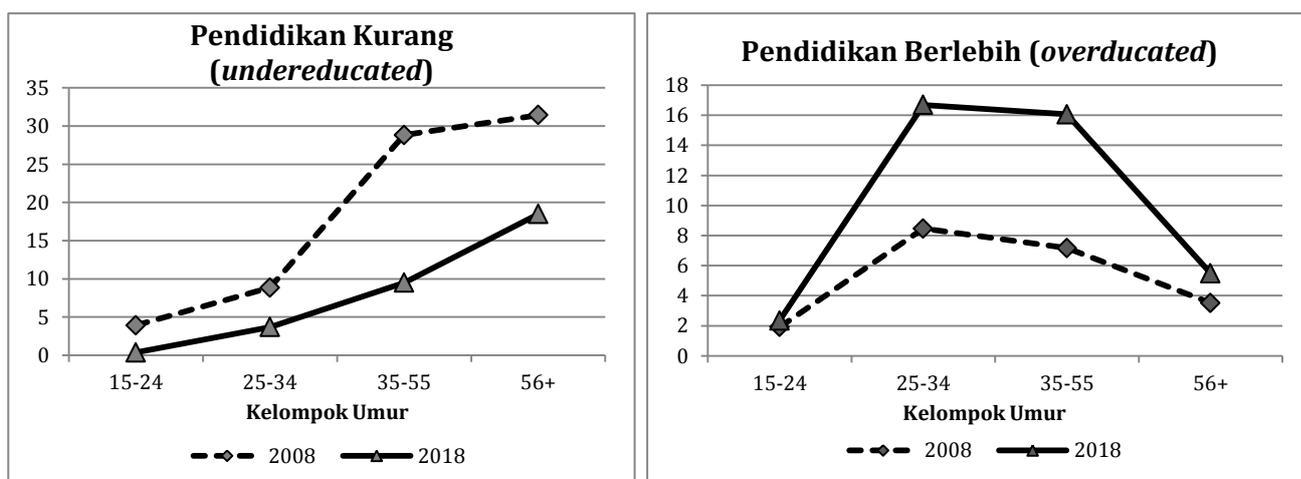
Pada tahun 2008 hampir 65 persen pekerja pertanian mempunyai tingkat pekerjaan yang kurang dari rata-rata (*undereducated*), namun jumlah ini berkurang menjadi 6,10 persen pada tahun 2018. Sebaliknya, jumlah pekerja pertanian yang tingkat pendidikannya berlebih meningkat dari 12,22 persen menjadi 35,85 persen

sekaligus menasbihkan sektor pertanian sebagai sektor paling *overeducated*. Perlu penelitian lanjutan untuk mengetahui mengapa hal ini terjadi, apakah sektor pertanian telah menarik minat banyak pekerja terdidik atau pekerja terdidik ini susah mencari kerja di sektor industri atau jasa.

Temuan yang menarik mengenai pola *overeducated/undereducated* dalam pasar kerja adalah dalam satu dekade ini persentase *overeducated* di Kabupaten Sidoarjo cenderung meningkat, sementara persentase *undereducated* cenderung menurun. Membandingkan pola tingkat pendidikan yang lebih dan kurang pada tahun 2008 dan 2018 sebagaimana terlihat pada grafik 4.3. di bawah ini, persentase *undereducated* dalam pasar kerja cenderung menurun menurut kelompok umur. Hal ini bisa dimaklumi mengingat akses terhadap dunia pendidikan terus diperbaiki. Perusahaan juga lebih senang merekrut pegawai muda dan berpendidikan tinggi.

Pekerja pada kelompok umur 56+ paling *undereducated* dibanding kelompok umur lainnya. Semakin tua usia pekerja, persentase pekerja yang *undereducated* semakin meningkat yang menunjukkan bahwa pekerja usia muda relatif lebih terdidik dibanding pekerja yang berusia lebih tua. Di sisi lain, pendidikan berlebih hampir terjadi di semua kelompok umur. Fenomena meningkatnya persentase pekerja dengan pendidikan berlebih (*overeducated*) ini menjadi sinyal bahwa makin banyak pekerja yang belum mencapai potensi optimalnya.

Grafik 4.3. Pola Pekerja dengan tingkat pendidikan kurang (Kiri) atau lebih (Kanan), Kabupaten Sidoarjo tahun 2008 dan 2018 (persen)

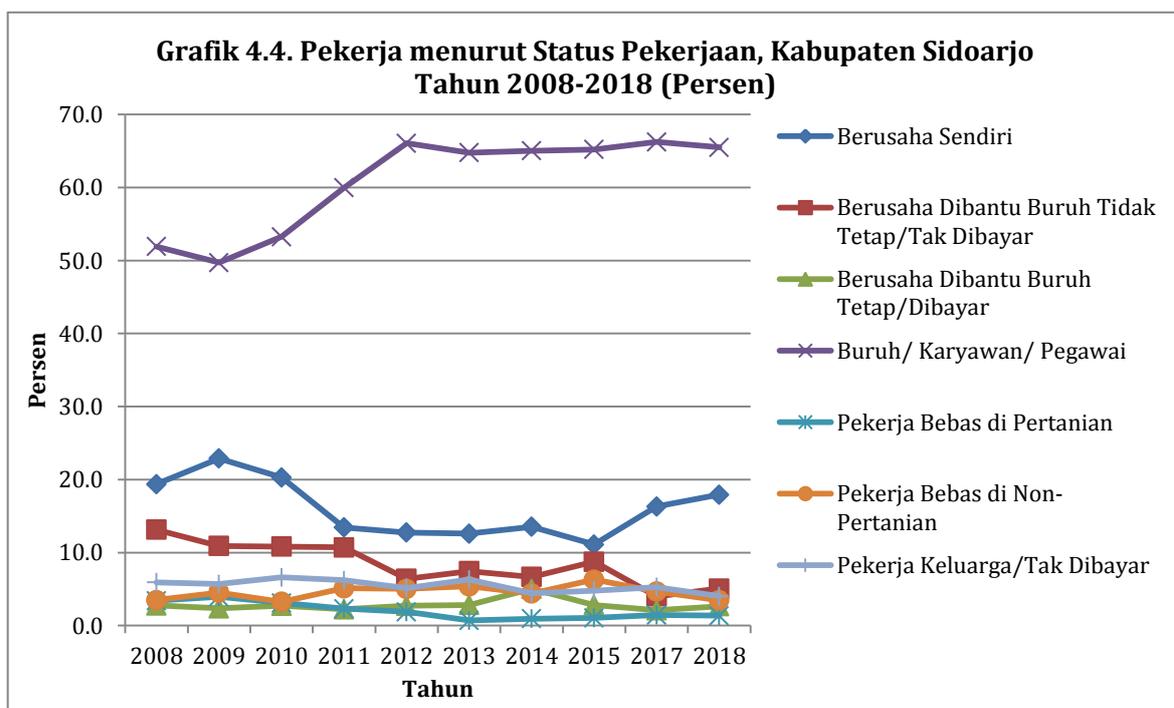


Sumber : Perhitungan Penulis, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2008 dan 2018

4.3. Status Pekerjaan

Pada tahun 2018 sekitar 65 persen pekerja di Sidoarjo berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai, kemudian di susul oleh pekerja mandiri sekitar 18 persen. Kondisi satu dekade yang lalu pada tahun 2008, persentase buruh dan pekerja mandiri masing-masing sebesar 52 persen dan 19 persen. Dengan demikian, jumlah buruh telah meningkat sebesar 13 persen dalam kurun waktu 10 tahun (lihat grafik 4.4). Pergeseran status pekerja ini merupakan refleksi dari perubahan struktur ekonomi yang lebih didominasi sektor industri dan jasa dibanding sektor pertanian.

Status buruh sering dihubungkan dengan kondisi kerja yang relatif baik karena sering dilindungi oleh jaminan sosial dan kesehatan. Sebaliknya, pekerja mandiri dan pekerja keluarga dalam penggolongan ILO (2016) disebut sebagai pekerja rentan. Dikategorikan sebagai pekerja rentan karena pekerja ini biasanya mempunyai kualitas pekerjaan yang rendah dan sering mengabaikan hak-hak pekerja. Persentase pekerja rentan di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2008 sebesar 25 persen dan jumlah ini turun sedikit menjadi 22 persen pada tahun 2018. Menurunnya porsi pekerja rentan ini menunjukkan kemampuan perekonomian dalam menciptakan lapangan pekerjaan formal bagi pekerja.



Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2008-2018

Ditinjau menurut jenis kelamin, pada tahun 2008 pekerja rentan laki-laki sebesar 12,37 persen dan pekerja rentan perempuan sebesar 34,65. persen. Satu dekade sesudahnya tahun 2018, pekerja rentan laki-laki menjadi 18,26 persen dan pekerja rentan perempuan menjadi 27,78 persen. Dengan demikian, pengurangan pekerja rentan paling banyak terjadi di kalangan perempuan. Menurunnya jumlah pekerja rentan perempuan memang telah diharapkan sebelumnya. Perlu diketahui, sebagian besar pekerja rentan laki-laki berstatus sebagai pekerja mandiri, sementara pekerja rentan perempuan berstatus sebagai pekerja keluarga.

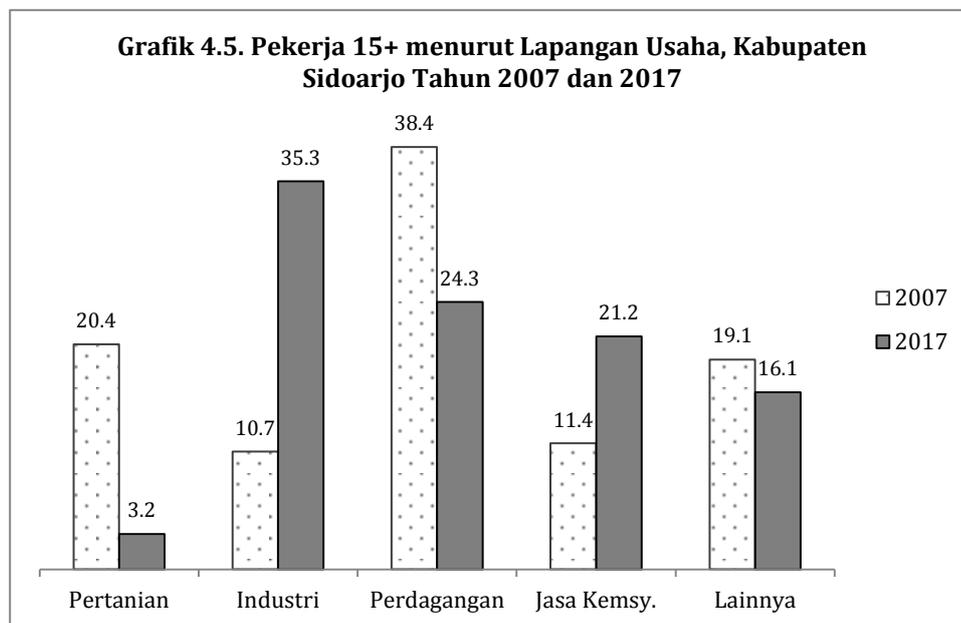
Yang menarik, jumlah pekerja rentan laki-laki justru meningkat di tengah maraknya penciptaan lapangan kerja formal. Bagi laki-laki, menjadi pekerja mandiri merupakan kebanggaan karena menjadi bos bagi usahanya, sementara bagi perempuan lebih ke arah menyeimbangkan peran bekerja dan mengurus rumahtangga. Meningkatnya persentase pekerja rentan laki-laki mungkin disebabkan oleh terbukanya peluang bekerja di sektor formal bagi perempuan sehingga meninggalkan pasangan bekerja seorang diri.

Beberapa negara memperluas konsep pekerja rentan ini, termasuk Indonesia. Pekerja rentan yang diperluas ini meliputi pekerja mandiri, pekerja keluarga, dan pekerja lepas. Kalau dilihat secara persentase, pekerja rentan yang diperluas tetap mengalami penurunan pada periode 2008-2018, dari 32 persen menjadi 26 persen.

4.4. Lapangan Usaha

Sebagaimana diketahui sebagian besar pekerja di Sidoarjo mencari nafkah di sektor industri manufaktur, dimana jumlahnya mencapai 35,3 persen pada tahun 2017 (lihat grafik 4.5). Padahal satu dekade lalu pada tahun 2007, jumlah pekerja yang bekerja di sektor ini masih sekitar 10 persen. Peningkatan persentase pekerja juga terjadi di sektor jasa kemasyarakatan. Di sisi lain, penurunan jumlah pekerja dialami oleh sektor pertanian dimana persentasenya turun drastis dari 20,4 persen pada 2007 menjadi 3,2 persen pada tahun 2018. Sayangnya, jumlah pekerja per lapangan usaha 9 ini sektor tidak dapat ditampilkan lagi pada tahun 2018 karena keberadaan *relatif standar error* hasil Sakernas Tahun 2018 yang relatif besar.

Salah satu isu menarik ketenagakerjaan di Kabupaten Sidoarjo adalah rendahnya partisipasi kerja perempuan. Sebagaimana ditunjukkan oleh hasil Sakernas tahun 2018 partisipasi kerja perempuan Sidoarjo hanya sebesar 49,79 atau yang paling rendah se-Jawa Timur. Dengan demikian, hanya sekitar setengah saja dari perempuan Sidoarjo yang aktif dalam pasar kerja, baik sedang bekerja atau mencari pekerjaan. Secara teori, kondisi ini tentu saja bertolak belakang dengan meningkatnya rata-rata lama pendidikan di Sidoarjo.



Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2007 dan 2017

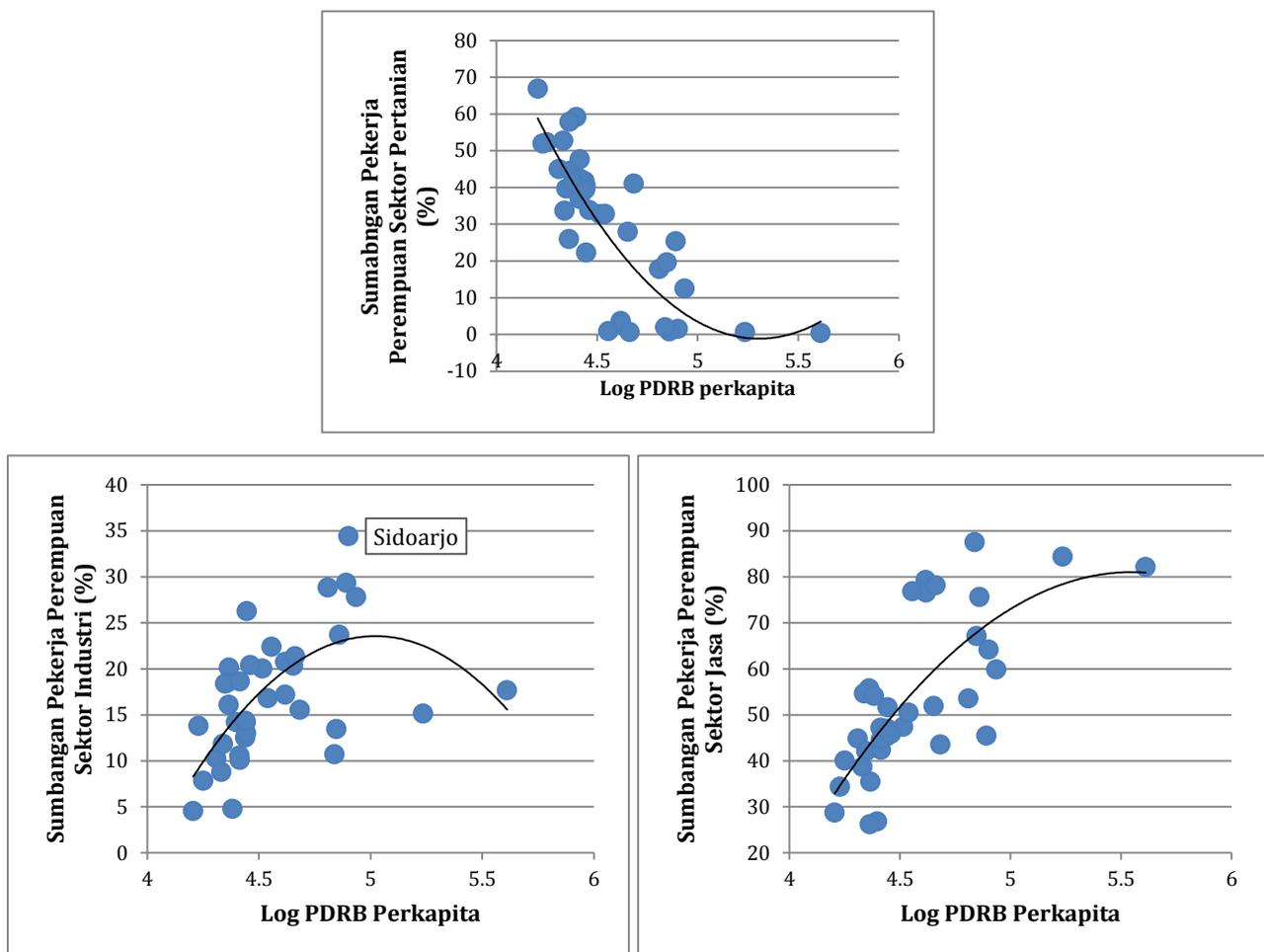
Goldin (1995) mengemukakan hipotesis bahwa hubungan antara perkembangan ekonomi dan partisipasi kerja perempuan berbentuk huruf U. Pada awal pembangunan ketika perekonomian masih bertumpu pada sektor pertanian, partisipasi kerja perempuan biasanya sangat tinggi sebagai pekerja keluarga/tak dibayar. Seiring meningkatnya aktifitas perekonomian yang lebih terbuka terhadap pasar, partisipasi perempuan mulai menurun. Pada tahap awal industrialisasi, partisipasi kerja perempuan justru menurun karena sifat sektor industri tahap awal yang lebih memerlukan kekuatan fisik.

Seiring perbaikan struktur industri dalam perekonomian, partisipasi kerja perempuan mulai meningkat. Hal ini didorong oleh meningkatnya pendidikan perempuan, preferensi pengusaha akan tenaga kerja perempuan, berkurangnya

tanggung jawab terhadap keluarga, dan longgarnya budaya yang memperbolehkan perempuan bekerja di luar rumah.

Dengan menggunakan data dari 38 kabupaten/kota, grafik 4.6 memperlihatkan bahwa saat sektor pertanian masih dominan dalam perekonomian, partisipasi kerja perempuan cenderung tinggi. Pembangunan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya PDRB per kapita akibat perbaikan metode dan penetrasi teknologi membuat kebutuhan terhadap tenaga kerja perempuan di sektor pertanian perlahan menurun. Namun, partisipasi kerja perempuan di sektor industri bergerak meningkat. Jika diperhatikan pada grafik 4.6 kiri, saat ini posisi Sidoarjo tengah berada di titik puncak. Dengan bentuk kurva Goldin yang berbentuk huruf U terbalik, partisipasi kerja perempuan Sidoarjo di sektor industri diperkirakan akan menurun untuk tahun-tahun mendatang. Sebagian pekerja perempuan Sidoarjo ini akan berpindah ke sektor jasa yang lebih ramah terhadap perempuan.

Grafik 4.6. Persentase Pekerja Perempuan dan PDRB perkapita, Provinsi Jawa Timur Tahun 2018



Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2018

Melihat kurva partisipasi kerja perempuan di sektor jasa yang bergerak eksponensial, maka bisa dipastikan sektor ini menjadi lapangan usaha favorit perempuan. Sayangnya, sektor jasa di Indonesia sebagian besar bersifat non formal dan variasinya sangat luas mulai dari perdagangan kecil-kecilan hingga pegawai pemerintahan. Namun lapangan kerja non formal yang tidak terikat waktu dan bisa dikerjakan dimana saja mungkin menjadi pilihan perempuan untuk menyeimbangkan peran antara bekerja dan mengurus rumahtangga.

4.5. Pekerjaan Tambahan

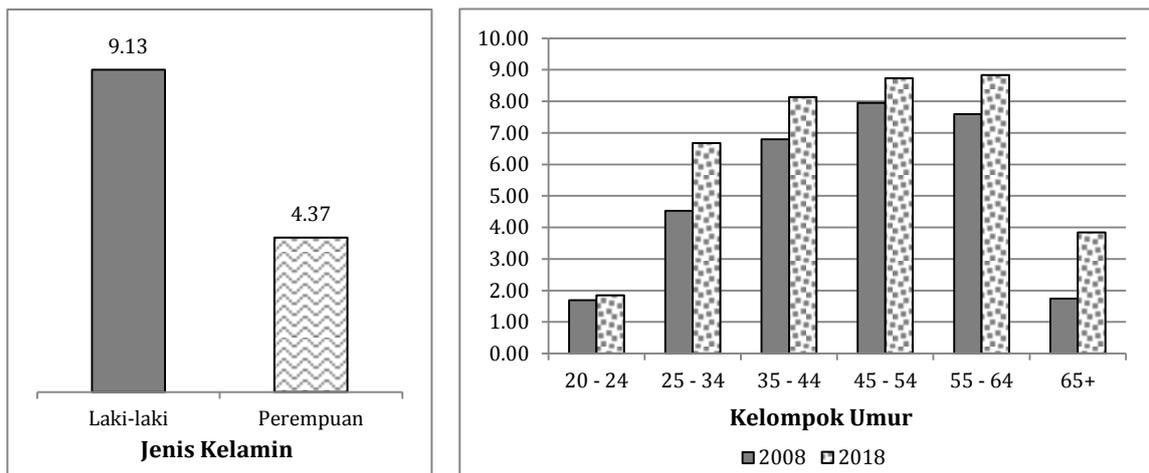
Yang menarik, proporsi pekerja yang memiliki pekerjaan tambahan meningkat dalam satu dekade terakhir, yakni dari 5,4 persen menjadi 7,8 persen dalam periode 2008-2018. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh perubahan sifat pekerjaan. Saat ini, hampir setiap pekerjaan telah mengandalkan teknologi sehingga dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Dengan teknologi pula, pekerjaan tambahan ini dapat dikerjakan dari jarak jauh dengan jam kerja yang lebih fleksibel. Selain itu, menjamurnya pekerjaan alih daya (*outsourcing*) dan tuntutan konsumsi yang tinggi juga mendorong pekerja untuk mempunyai pekerjaan tambahan (ILO, 2016).

Secara teori, pekerjaan tambahan muncul jika pendapatan pada pekerjaan utama tidak memenuhi target pendapatan rumahtangga. Semakin lebar jarak antara pendapatan yang diterima dari pekerjaan utama dengan target pendapatan, maka kecenderungan seseorang untuk mempunyai pekerjaan tambahan semakin besar (Robinson dan Wadsworth, 2006).

Dilihat menurut jenis kelamin, pekerja laki-laki cenderung mempunyai pekerjaan tambahan daripada perempuan. Pada tahun 2018 pekerja laki-laki dan perempuan yang memiliki pekerjaan tambahan masing-masing sebesar 9,13 persen dan 4,37 persen. Tidak amannya pekerjaan (karena alih daya) dan kurangnya penghasilan yang diterima untuk konsumsi rumahtangga mendorong pekerja laki-laki untuk melakukan pekerjaan tambahan. Hal ini tentu tidak terlepas dari peran laki-laki sebagai sumber pendapatan utama dalam keluarga (*breadwinner*).

Sementara itu, persentase pekerja yang memiliki pekerjaan tambahan meningkat di semua kelompok umur pada periode 2008-2018. Sebagaimana terlihat pada grafik 4.7 di bawah ini, pola kepemilikan pekerjaan tambahan menurut kelompok umur menyerupai huruf U terbalik. Semakin bertambahnya usia, pekerja cenderung untuk mempunyai pekerjaan tambahan, dan persentase ini kemudian turun drastis pada usia manula 65+. Fenomena meningkatnya kepemilikan pekerjaan tambahan seiring meningkatnya umur ini mungkin disebabkan oleh membesarnya pendapatan yang harus disediakan bagi keluarga. Ketika anak-anak mulai hidup mandiri dan usia pekerja mulai tua, desakan menyediakan keuangan dalam jumlah besar semakin berkurang sehingga kepemilikan pekerjaan tambahan ikut berkurang.

Grafik 4.7. Persentase Pekerja yang Memiliki Pekerjaan Tambahan, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018



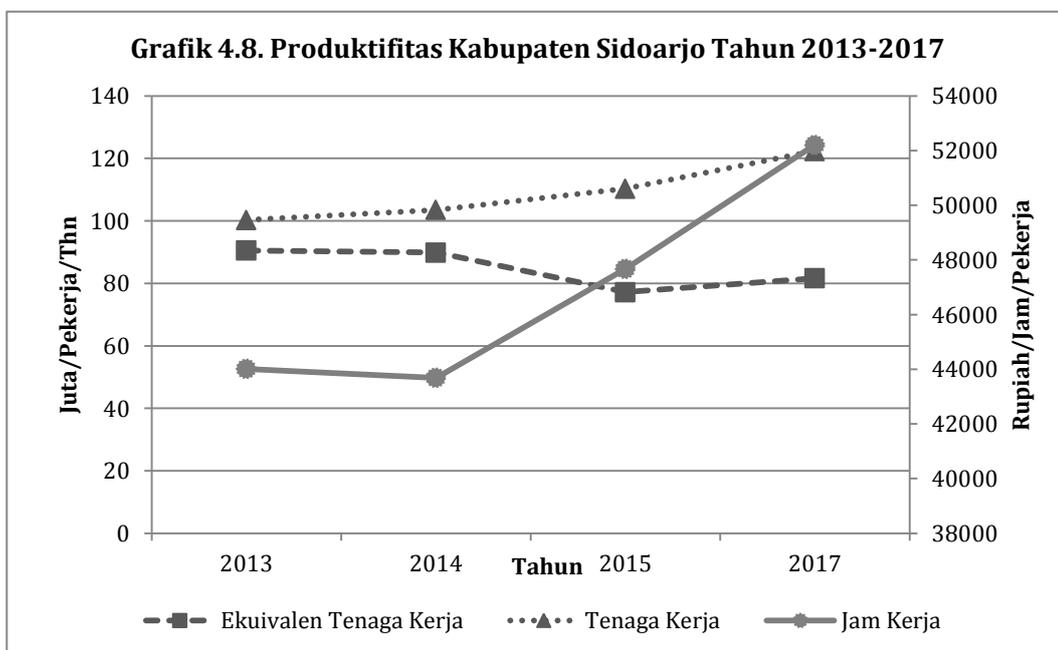
Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2018

4.6. Produktifitas

Produktifitas mengukur sejauh mana input produksi yang digunakan dalam proses produksi telah menghasilkan output. Input produksi ini meliputi bahan baku, tenaga kerja, mesin, metode, dan modal. Dari waktu ke waktu input produksi semakin langka dan mahal sehingga keterbatasan ini mendorong perusahaan untuk melakukan efisiensi dan meningkatkan produktifitas. Oleh karena itu, produktifitas merupakan kunci pertumbuhan ekonomi dan tingkat kompetitif suatu wilayah dalam jangka panjang. Dengan kata lain, kinerja produktifitas akan menentukan tingkat kemakmuran wilayah yang bersangkutan.

Beberapa faktor utama yang menentukan tingkat produktifitas adalah tenaga kerja, modal, dan teknologi informasi. Oleh karena itu, usaha untuk meningkatkan produktifitas seharusnya diupayakan dengan meningkatkan akumulasi dan investasi modal, pembangunan sumber daya manusia, dan inovasi teknologi. Faktor lain yang turut mempengaruhi besaran produktifitas antara lain ketersediaan sumber daya alam, struktur dan pergeseran tenaga kerja antar lapangan usaha, dan kondisi mikro dan makro ekonomi (Kemnaker dan BPS, 2018).

Beberapa metode pengukuran produktifitas adalah produktifitas menurut tenaga kerja, produktifitas ekuivalen tenaga kerja, dan jam kerja. Sebagaimana terlihat pada grafik 4.8 di bawah ini, produktifitas tenaga kerja Kabupaten Sidoarjo terus meningkat. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, sebagian hal ini disebabkan oleh meningkatnya tingkat pendidikan pekerja di Kabupaten Sidoarjo sehingga mereka mampu menguasai teknologi produksi lebih baik. Dengan demikian, output yang dihasilkan tiap pekerja selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya. Pada tahun 2014 produktifitas pekerja mencapai 100 juta rupiah per tahun dan pada tahun 2017 nilai ini mencapai 122 juta rupiah per tahun.



Sumber : Kemnaker dan BPS (2018), Pengukuran Produktifitas Tenaga Kerja Nasional, Regional, dan Sektoral Tahun 2018

Meski sempat turun pada tahun 2014, nilai produktifitas menurut jam kerja juga terus meningkat. Pada tahun 2014 produktifitas pekerja mencapai 44 ribu rupiah per jam dan nilai ini kemudian terus meningkat hingga menjadi 52,2 ribu rupiah per jam pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa pekerja Sidoarjo mampu menghasilkan lebih banyak output tiap jamnya dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Sayangnya, produktifitas ekuivalen tenaga kerja atau tenaga kerja penuh tidak menunjukkan performa yang sama dengan dua metode sebelumnya. Tenaga kerja penuh ini didefinisikan sebagai tenaga kerja dengan jam kerja 40 jam seminggu. Produktifitas tenaga kerja penuh di Sidoarjo terus mengalami penurunan pada periode 2013-2015 meski nilainya naik tipis pada tahun 2017. Mengingat nilai produktifitas tenaga kerja penuh lebih rendah dari produktifitas tenaga kerja, dapat dikatakan bahwa perekonomian belum mencapai efisiensi. Ini berarti output yang sama dapat dihasilkan dengan menggunakan jam kerja yang lebih sedikit.

5

PROFIL PENGANGGUR

Angka pengangguran selalu menjadi isu paling panas dalam setiap perdebatan mengenai indikator ketenagakerjaan. Sebagaimana dimaklumi, angka pengangguran akan menunjukkan dinamika kesejahteraan pekerja dan masyarakat pada umumnya. Kalau angka pengangguran minimal, itu berarti semua penduduk telah bekerja dan memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, angka pengangguran juga menunjukkan apakah ekonomi telah mendayagunakan seluruh potensi modal manusia yang ada. Kalau angka pengangguran rendah, hal itu berarti hampir seluruh potensi manusia telah digunakan.

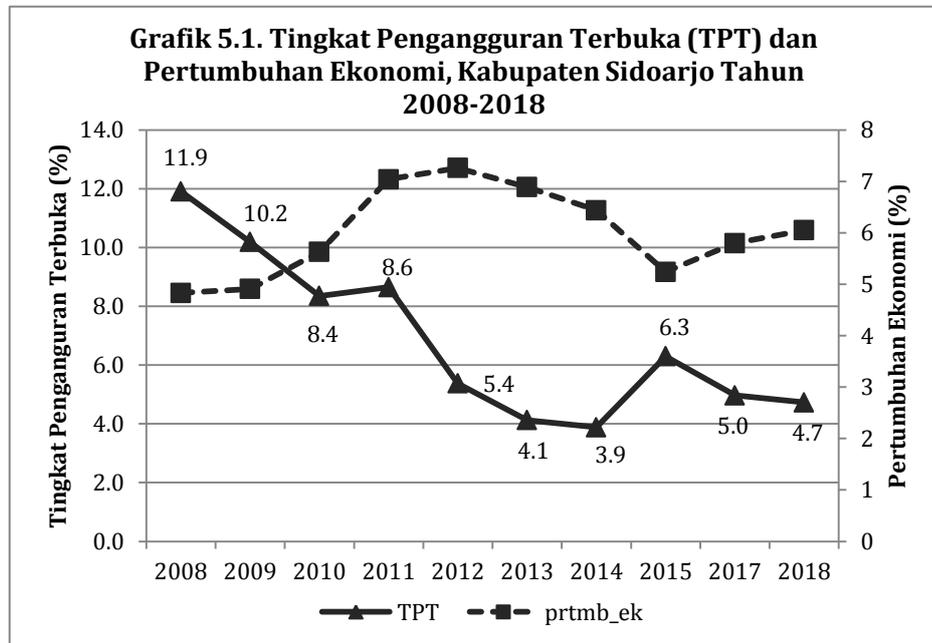
Publikasi ini bertujuan untuk memberi gambaran mengenai kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Sidoarjo. Untuk gambaran penganggur, karakteristik penganggur yang akan dibahas meliputi tren pengangguran, kelompok umur, tingkat pendidikan, dan tingkat kesejahteraan. Di bagian akhir, diskusi mengenai pengangguran nol persen akan disertakan dari sudut pandang ilmu ekonomi.

5.1. Tren Pengangguran

Dalam satu dekade terakhir tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Sidoarjo cenderung menurun sebagaimana terlihat pada grafik 5.1 berikut. Tentu saja tingkat pengangguran ini bergerak dinamis mengikuti perkembangan ekonomi. Pada tahun 2018 ini penyaluran kredit Bank Indonesia ke sektor penyediaan akomodasi dan restoran di Kabupaten Sidoarjo menempati posisi ke-2 setelah Kabupaten Gresik (Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, 2018). Tidak mengherankan jika kemudian perekonomian Sidoarjo bisa tumbuh 6,05 persen dan menyerap banyak tenaga kerja.

Dalam jangka panjang semua orang ingin mencari penjelasan mengenai tren tingkat pengangguran di Kabupaten Sidoarjo ini. Dengan demikian, antisipasi terhadap lonjakan angka pengangguran akibat gangguan perekonomian dapat dilakukan sedini mungkin. Menempatkan angka pengangguran dan pertumbuhan ekonomi dalam satu grafik (lihat grafik 5.1), suatu pola tertentu segera tampak. Ketika pertumbuhan ekonomi sedang bagus, maka tingkat pengangguran ikut turun;

demikian pula sebaliknya. Hal ini sesuai dengan penelitian Chowdury, et.al (2009) yang menyatakan bahwa kondisi ketenagakerjaan Indonesia lebih disebabkan oleh faktor *demand-pull* (melalui pertumbuhan ekonomi).



Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2007 dan 2018

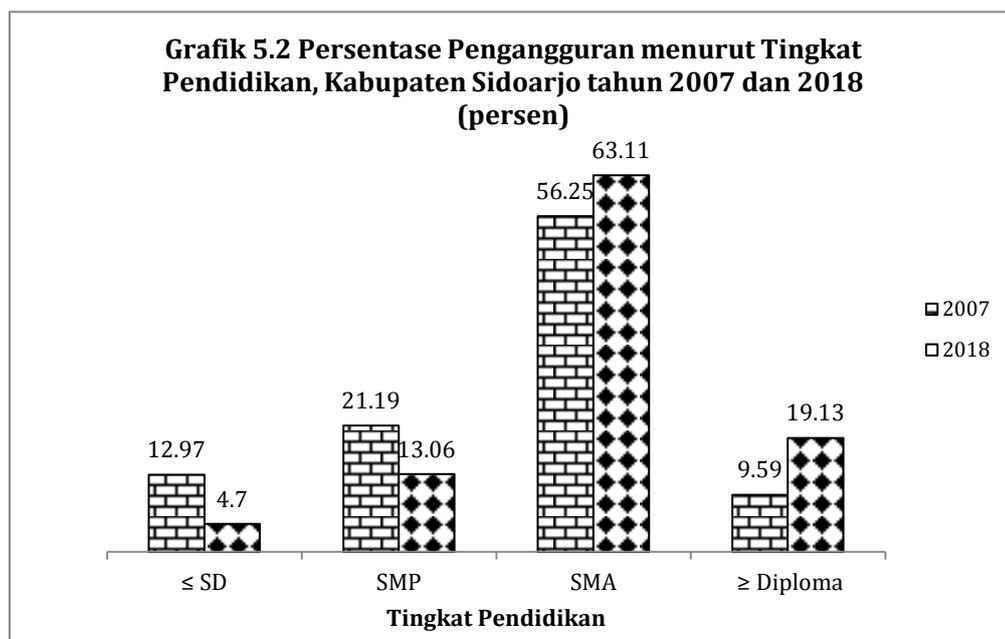
Hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran di Kabupaten Sidoarjo secara statistik mencapai 0,6 atau relatif kuat. Dalam rentang waktu 2008-2018 setiap tambahan satu persen pertumbuhan ekonomi akan menurunkan angka pengangguran sebesar 1,7 persen; demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu, upaya menekan angka pengangguran perlu dibarengi dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Grafik ini juga menunjukkan bahwa pengaruh kenaikan upah pekerja terhadap fluktuasi angka pengangguran di Sidoarjo kurang berarti secara statistik.

5.2. Tingkat Pendidikan

Sebenarnya distribusi penganggur menurut tingkat pendidikan tidak jauh berbeda antara tahun 2018 dengan kondisi satu dekade sebelumnya. Seseorang yang memiliki pendidikan SMA mempunyai persentase pengangguran paling besar, diikuti oleh tingkat pendidikan universitas, SMP, dan SD ke bawah (lihat grafik 5.2).

Dengan rata-rata lama sekolah yang terus meningkat dan pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun, sebagian besar pemuda Sidoarjo saat ini telah mempunyai ijazah SMA. Pasokan tenaga kerja ulusan SMA yang masif ini menyebabkan beberapa mengalami kesulitan dalam memasuki pasar kerja. Faktor *mismatch* pengetahuan/ketrampilan dan diskriminasi terhadap calon pekerja sering diajukan sebagai alasan penjas. Jenis pengangguran yang timbul karena ketidakcocokan karakteristik ini disebut pengangguran struktural. Beberapa waktu lalu sempat digencarkan program sekolah SMK untuk mengurangi kesenjangan keterampilan antara pekerja dan kebutuhan dunia usaha, namun program ini dinilai belum berhasil bahkan mempertinggi angka pengangguran tingkat SMK.

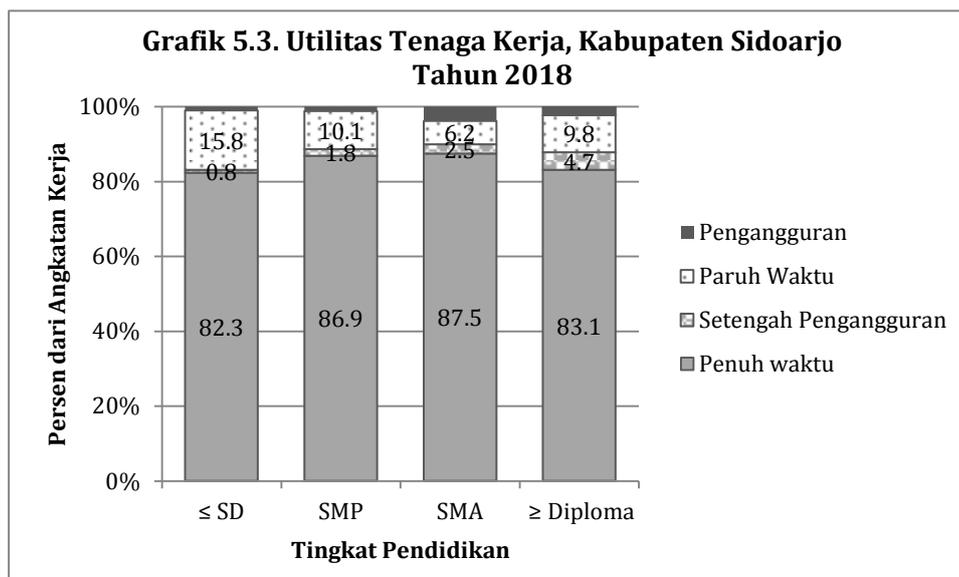
Sebenarnya, alasan *mismatch* ini dapat dipandang dari sudut pengusaha dan calon pekerja. Dari sudut pandang pengusaha, mungkin pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh calon pekerja tidak sesuai dengan kebutuhan usahanya sebagaimana telah diuraikakan sebelumnya. Dari sudut pandang pencari kerja, mungkin pekerjaan yang ada tidak sesuai *passion* dan upah yang diinginkan (*reservation wage*). Oleh karena itu, pengangguran tidak harus diartikan dengan ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap tambahan tenaga kerja baru, namun preferensi pencari kerja (*supply side*) juga perlu dipertimbangkan.



Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2007 dan 2018

Sebagian besar masyarakat pasti sudah paham mengapa pengangguran pada kelompok berpendidikan rendah relatif lebih kecil dibanding kelompok yang berpendidikan tinggi. Seseorang yang berpendidikan rendah biasanya mempunyai kondisi ekonomi yang rendah atau kekurangan. Orang-orang ini sudah pasti tidak mempunyai cukup sumber daya untuk menganggur terlalu lama, apalagi Indonesia tidak mempunyai jaminan sosial bagi penganggur. Tidak bekerja bagi kelompok penduduk ini berarti tidak ada pemasukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, kelompok berpendidikan rendah akan bekerja apa saja untuk bertahan hidup dan menghindari menjadi penganggur.

Meski distribusi menurut tingkat pendidikan relatif masih sama dalam satu dekade terakhir, namun secara tren, angka pengangguran lulusan SMA dan universitas cenderung meningkat, masing-masing sekitar 7 (tujuh) dan 10 (sepuluh) persen. Lulusan pendidikan tinggi relatif mempunyai posisi rebut tawar (*bargaining position*) yang lebih kuat dibanding rekannya yang berpendidikan rendah. Dia tidak akan mau menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan pendidikan/keterampilan atau upah yang diinginkannya (*reservation wage*). Kalau tidak terjadi kesepakatan antara calon pekerja dan pengusaha, maka calon pekerja ini bersedia menunggu lebih lama dan memilih untuk menganggur (pengangguran sukarela).



Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2018

Tantangan ketenagakerjaan di Kabupaten Sidoarjo bukan hanya tingkat pengangguran saja, namun juga pekerja dengan jam kerja di bawah 35 jam seminggu atau disebut pekerja paruh waktu (lihat grafik 5.3. di atas). Pekerja ini biasanya kurang produktif, bergaji rendah, dan mempunyai lingkungan kerja yang buruk yang tidak menyediakan jaminan dan hak-hak pegawai. Pekerja lulusan SMP ke bawah di Sidoarjo cenderung bekerja paruh waktu dibanding rekannya yang berijazah SMA. Sebagaimana dikemukakan oleh Allen (2016), pekerja lulusan SMP ke bawah sering berpindah-pindah pekerjaan sebagai pekerja kasar dan sektor pertanian. Studi BPS (2015) mengungkapkan bahwa lulusan SMA mempunyai peluang 3,5-4,5 kali lipat untuk menjadi pegawai tetap dengan gaji di atas UMR dibanding rekannya yang berpendidikan di bawahnya.

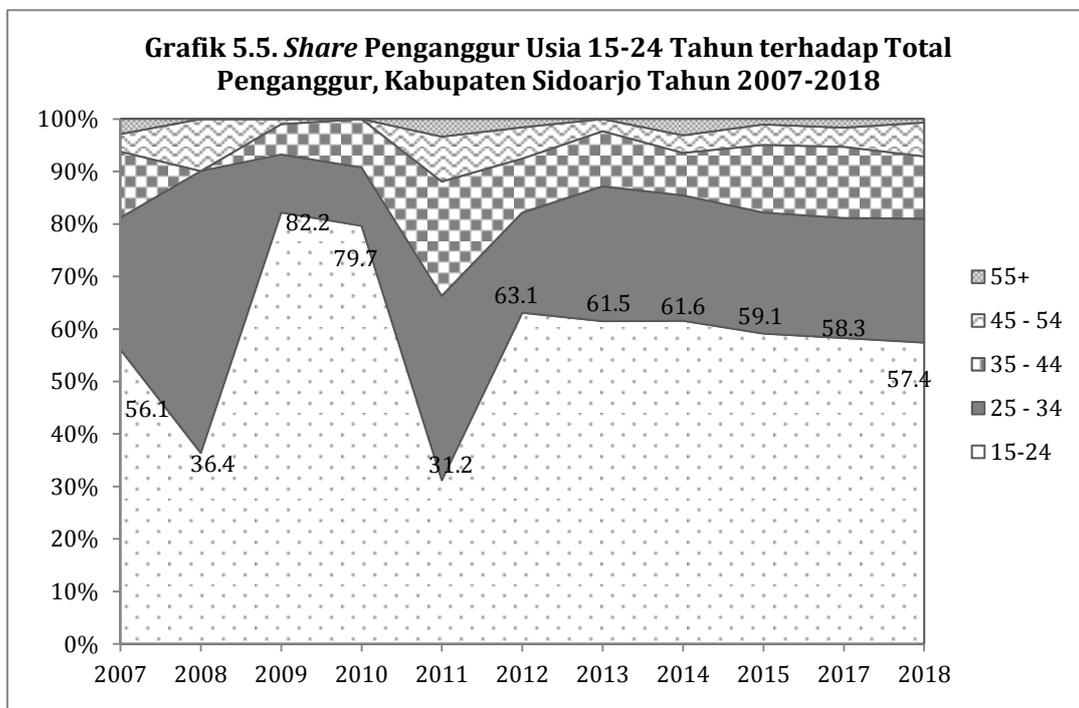
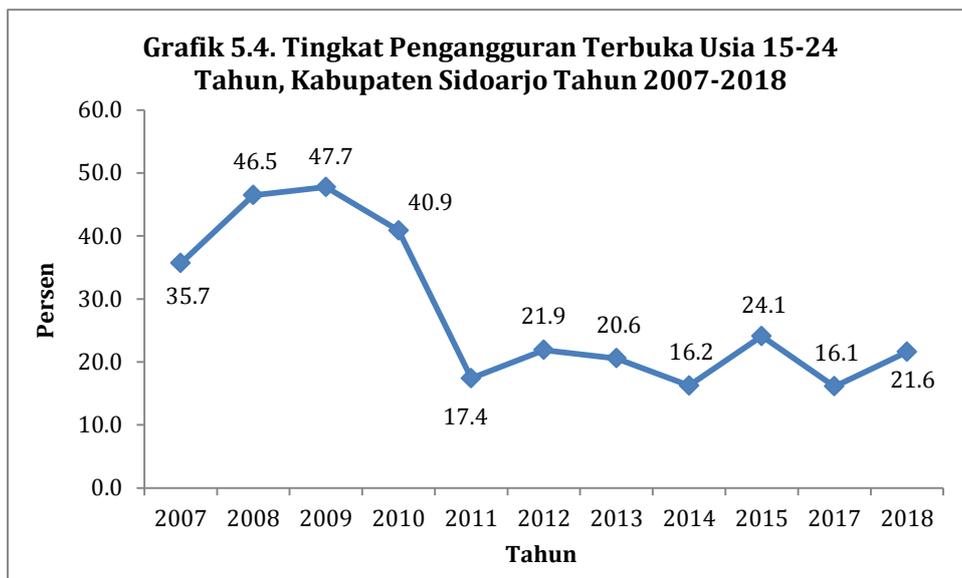
Yang menarik, persentase pekerja paruh waktu juga relatif tinggi pada lulusan diploma ke atas yang menunjukkan kegagalan dalam menciptakan lapangan kerja penuh waktu. Kadangkala, bekerja paruh waktu merupakan pilihan pekerja sendiri, terutama perempuan, untuk menyeimbangkan peran sebagai pekerja dan pengurus rumahtangga. Seringkali pekerjaan yang dilakukan perempuan bersifat *makloon* atau usaha mandiri yang bisa dikerjakan tanpa perlu meninggalkan rumah. Dengan demikian, perempuan bisa mengerjakan dua kegiatan sekaligus tanpa merasa bersalah meninggalkan urusan rumahtangga.

Selain itu, kecenderungan untuk menjadi pekerja setengah pengangguran juga meningkat seiring meningkatnya tingkat pendidikan (grafik 5.3). Pekerja setengah pengangguran (*underemployment*) ini didefinisikan dengan pekerja dengan jam kerja kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari pekerjaan lainnya. Semakin tinggi tingkat pendidikan, persentase pekerja paruh waktu yang masih mencari kerja semakin besar. Hal ini menunjukkan bahwa upah pekerja paruh waktu bagi pekerja lulusan pendidikan tinggi masih belum memenuhi target pendapatan sehingga mereka masih terus mencari kerja. Dengan kata lain, mereka bukan sukarela atau sengaja menjadi pekerja paruh waktu.

5.3. Kelompok Umur

Penganggur kaum muda merupakan masalah ketenagakerjaan penting bagi banyak negara yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan. Untuk tujuan

indikator ini, istilah "kaum muda" mencakup orang yang berumur 15 sampai 24 tahun, sedangkan "orang dewasa" didefinisikan sebagai orang yang berumur 25 tahun ke atas. Indikator pengangguran kaum muda dalam publikasi ini disajikan sebagai tingkat pengangguran terbuka kaum muda dan *share* pengangguran kaum muda terhadap total penganggur.



Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2007-2018

Dari grafik 5.4. di atas terlihat bahwa secara umum tren TPT usia muda cenderung turun meskipun angkanya berfluktuasi tiap tahun. Hal ini menunjukkan

bahwa kaum muda Sidoarjo makin mudah memasuki pasar kerja, entah sebagai pekerja atau pencari kerja. Pada tahun 2018 TPT kaum muda Kabupaten Sidoarjo sebesar 21,6 yang berarti dari 100 orang pemuda yang aktif dalam pasar kerja, sekitar 22 orang sedang menganggur dan 78 orang sisanya sedang bekerja. Meski demikian, tingkat pengangguran kaum muda di Sidoarjo masih tinggi. Dibanding dengan TPT secara keseluruhan, TPT kaum muda lebih dari 4 (empat) kali lipat.

Secara umum, grafik 5.5 juga menunjukkan bahwa persentase pengangguran cenderung menurun seiring meningkatnya usia. Jika *mismatch* dan mencari pekerjaan yang cocok sering menjadi alasan bagi penganggur muda, maka rendahnya penganggur usia tua adalah rendahnya kesempatan untuk berpindah antar perusahaan/instansi. Kesetiaan masih menjadi preferensi perusahaan dalam menerima calon pekerja, bukan profesionalisme. Oleh karena itu, pekerja usia tua jarang mencari pekerjaan dan hanya menekuni pekerjaan di perusahaan yang sama (Manning, 1998).

Ditinjau dari sumbangannya terhadap total penganggur, jumlah penganggur muda juga bergerak fluktuasi dengan pola yang sama dengan TPT kaum muda (lihat grafik 5.5). Pada tahun 2018 ini sumbangan penganggur kaum muda mencapai 57,4 persen atau lebih setengah dari total seluruh penganggur. Melihat grafik 5.5. lebih teliti, porsi penganggur muda ini terus menurun sejak tahun 2013.

5.4. Tingkat Kesejahteraan

Meneliti hubungan antara status bekerja dan tingkat kesejahteraan di Kabupaten Sidoarjo, ternyata semakin tinggi tingkat kesejahteraan, semakin besar persentase penduduk yang bekerja. Sebaliknya, semakin tinggi tingkat kesejahteraan, semakin rendah persentase penduduk yang menganggur (lihat tabel 5.1 di bawah ini). Mungkin sulit membuktikan hubungan kausal diantara keduanya, apakah kondisi bekerja yang menyebabkan seseorang menjadi kaya, atau karena kondisi kaya yang mendorong seseorang untuk bekerja guna mengekspresikan diri. Namun anggapan bahwa orang kaya tidak perlu bekerja belum mendapat dukungan bukti empiris di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini sekaligus mengkonfirmasi temuan Manning dan Junankar (1998) yang menyatakan bahwa pengangguran di Indonesia bukan *luxury unemployment*.

Tabel 5.1. Distribusi Pekerja dan Penganggur menurut Tingkat Kesejahteraan, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018

Tingkat Kesejahteraan	Pekerja	Penganggur
Terendah	17,50	32,20
Kuintil 2	19,40	19,50
Kuintil 3	19,90	20,40
Kuintil 4	20,90	16,20
Tertinggi	22,30	11,70
Jumlah	100,00	100,00

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2018

Selanjutnya, tabel 5.1 juga memperlihatkan bahwa terdapat 17,50 persen pekerja yang masih memiliki kesejahteraan rendah. Sebaliknya, ada 11,70 persen penganggur yang ternyata berasal dari rumahtangga kalangan atas. Dari sini dapat disimpulkan bahwa tidak setiap pekerja itu lantas menjadi sejahtera, dan tidak setiap penganggur memiliki kehidupan ekonomi yang memprihatikan. Oleh karena itu, perhatian pemerintah seharusnya diarahkan tidak saja kepada penganggur dari kalangan bawah yang sebesar 32,20 persen, namun juga kepada 17,50 persen pekerja yang hidup kurang sejahtera.

Dilihat dari kepemilikan barang-barang dalam rumahtangga, tidak semua penganggur itu hidup menyedihkan. Tabel 5.2 memperlihatkan bahwa penganggur juga memiliki barang-barang mewah sebagaimana pekerja pada umumnya, namun persentasenya lebih kecil. Hipotesis bahwa pengangguran itu suatu kemewahan seperti halnya kurang tepat untuk menggambarkan kondisi Sidoarjo karena kondisi pekerja tetap lebih baik daripada penganggur.

Sekarang perhatikan kepemilikan barang-barang rumahtangga menurut status bekerja pada tabel 5.2. di bawah ini. Secara umum terlihat bahwa persentase penganggur yang memiliki barang-barang berharga di rumahnya memang selalu lebih kecil dari pekerja. Sebagai contoh, penganggur yang memiliki AC di rumahnya sebesar 10,40 persen, sementara persentase yang sama untuk pekerja sebesar 19,70 persen. Penganggur yang memiliki mobil di rumahnya sebesar 14,80 persen dan

pekerja yang memiliki barang yang sama di rumahnya sebesar 23,50 persen. Hal ini menegaskan bahwa kehidupan penganggur tidak selalu buruk.

Tabel 5.2. Kepemilikan Alat-alat Rumahtangga antara Pekerja dan Penganggur, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018

Kepemilikan Alat-alat Rumahtangga	Pekerja	Penganggur
Lemari Es	88,20	80,00
AC	19,70	10,40
Komputer/Laptop	40,70	31,30
Emas/Perhiasan (minimal 10 gram)	33,70	19,10
Sepeda Motor	93,10	85,20
Mobil	23,50	14,80
Televisi Layar Datar (minimal 30 inch)	28,00	20,90

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2018

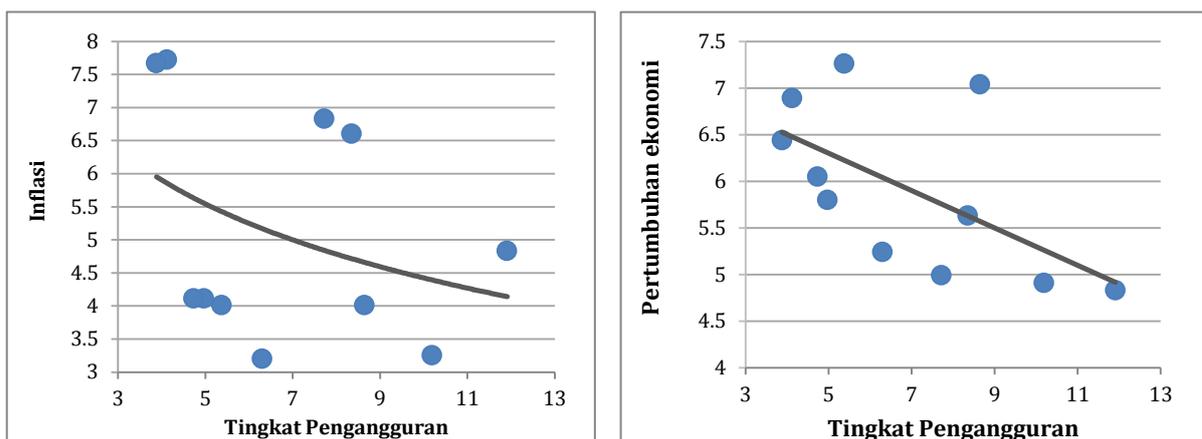
5.5. Pengangguran Nol Persen, mungkinkah?

Apakah pengangguran bisa mencapai 0 persen? Di atas kertas tentu saja bisa. Hampir setiap pemangku kebijakan pasti menginginkan hal ini. Pengangguran nol persen berarti semua angkatan kerja telah bekerja dan tidak ada pencari kerja. Tidak adanya pencari kerja ini bisa disebabkan oleh dua hal, yakni pencari kerja sudah diterima bekerja, atau pencari kerja tidak lagi mencari kerja karena merasa putus asa (*discouraged worker*). Kalau tenaga kerja sudah terpakai semua, itu berarti telah terjadi kekurangan tenaga kerja.

Secara ekonomi, ketika seluruh tenaga kerja telah terpakai, maka akan ada desakan untuk menaikkan upah buruh. Kenaikan upah buruh ini akan menaikkan biaya produksi sehingga mendorong kenaikan harga barang di pasaran (terjadi inflasi). Inflasi ini pada gilirannya akan mendorong pekerja untuk menuntut kenaikan upah lebih tinggi lagi, dan kondisi ini akan berulang secara terus menerus. Oleh karena itu, para ekonom lebih suka kalau angka pengangguran tidak nol persen tapi sangat rendah. Seberapa rendah? Hal itu bahkan tidak bisa dijawab oleh ekonom sendiri (Blanchard 2017, p. 30).

Ilmu ekonomi mempunyai dua teori yang berhubungan dengan tingkat pengangguran. Pertama adalah teori yang menghubungkan tingkat pengangguran dengan tingkat inflasi yang disebut **Kurva Philips**. Kedua adalah teori yang menghubungkan tingkat pengangguran dengan pertumbuhan output yang disebut **Hukum Okun**. Menurut kurva Philips, tingkat pengangguran berhubungan negatif dengan kenaikan harga-harga (inflasi). Ini berarti bahwa tingkat pengangguran yang rendah akan mendorong inflasi dan tingkat pengangguran yang tinggi akan menghambat kenaikan harga barang-barang. Dengan menggunakan data pengangguran dan inflasi yang dihitung oleh BPS Kabupaten Sidoarjo, bentuk hubungan antara tingkat pengangguran dan inflasi dapat digambarkan dalam grafik 5.4 (kiri).

Grafik 5.6. Hubungan antara tingkat pengangguran dengan inflasi (kiri) dan pertumbuhan ekonomi (kanan), Kabupaten Sidoarjo tahun 2007-2018



Sumber : BPS Kabupaten Sidoarjo

Tingkat pengangguran dan inflasi di Kabupaten Sidoarjo mempunyai hubungan negatif sebagaimana terlihat dalam grafik. Oleh karena itu, upaya untuk menjadikan angka pengangguran nol persen justru akan membuat harga barang-barang naik lebih dari 7 persen. Kenaikan harga-harga ini selanjutnya akan mempengaruhi tingkat kemiskinan karena jumlah barang yang dikonsumsi masyarakat semakin sedikit. Yang perlu diketahui, kurva Philips ini tidak berlaku umum untuk semua wilayah karena ada beberapa wilayah yang hubungan antara tingkat pengangguran dan inflasi justru positif (Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN, tanpa tahun) atau bahkan tidak beraturan (Blanchard, 2017 p.161).

Sebagaimana terlihat dalam grafik 5.4. kanan, hukum Okun berlaku untuk Sidoarjo. Ini berarti bahwa setiap upaya untuk menurunkan tingkat pengangguran harus diiringi dengan kerja keras menggenjot tingkat pertumbuhan ekonomi hingga lebih tujuh persen. Namun, pertumbuhan ekonomi yang cepat bisa menyebabkan *overheat* dalam perekonomian yang berdampak pada dorongan inflasi yang lebih tinggi. *Overheat* ini terjadi jika permintaan masyarakat melebihi kapasitas produksi. Selanjutnya, inflasi tinggi akan menggerus daya beli dan menurunkan tingkat kesejahteraan.

Dari uraian mengenai kurva Philips dan hukum Okun di atas, memang tidak mudah untuk menjadikan angka pengangguran nol persen. Perlu kerja keras untuk menjaga keseimbangan antara angka pengangguran, dorongan inflasi, dan pertumbuhan ekonomi.

6

KESIMPULAN DAN SARAN

Publikasi ini bertujuan untuk memberi gambaran mengenai kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Sidoarjo. Bab-bab sebelumnya telah membahas kondisi sosial ekonomi, pekerja, dan pengangguran ditinjau dari beberapa karakteristik demografi dan ekonomi.

6.1. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang bisa diperoleh, antara lain :

1. Struktur perekonomian Kabupaten Sidoarjo telah didominasi oleh sektor industri dan sektor jasa. Hal ini membawa dampak bagi perubahan struktur ketenagakerjaan Sidoarjo dalam lingkup yang lebih luas. Sebagian besar pekerja Sidoarjo terserap di sektor industri dengan status sebagai buruh dibayar. Sebagai dampaknya, peran perempuan sebagai pekerja keluarga/tidak dibayar semakin berkurang.
2. Pertumbuhan penduduk usia kerja membuat pasokan tenaga kerja semakin besar. Namun, jumlah pelajar dan pengurus rumahtangga juga semakin membesar. Besarnya penduduk yang tidak aktif ini juga membawa kekhawatiran tersendiri apakah kegiatan bersekolah dan mengurus rumahtangga merupakan keputusan mandiri atau kondisi pasar kerja yang tidak memungkinkan.
3. Pekerja di Kabupaten Sidoarjo semakin meningkat dan berkualitas. Hal ini ditunjukkan oleh makin banyaknya pekerja dengan tingkat pendidikan tinggi. Jumlah pekerja dengan pendidikan kurang semakin mengecil, namun jumlah pekerja dengan pendidikan berlebih justru bertambah.
4. Meningkatnya rata-rata lama sekolah pekerja mempengaruhi tingkat produktifitas Sidoarjo secara keseluruhan. Tingkat produktifitas pekerja terus meningkat, namun produktifitas tenaga kerja penuh cenderung turun yang mengisyaratkan bahwa pekerjaan sebenarnya bisa dilakukan lebih cepat.
5. Pengangguran Sidoarjo lebih berhubungan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi daripada tingkat upah. Pengangguran kaum muda relatif turun dibanding tahun-tahun sebelumnya meskipun relatif masih besar.

6. Pengangguran paling banyak terdapat pada penduduk berpendapatan rendah yang menunjukkan adanya kesulitan golongan ini dalam memasuki pasar kerja. Selain itu, pengangguran juga banyak terdapat pada penduduk yang berpendidikan rendah.

6.2. Saran

1. Mengingat sektor industri dan jasa menjadi lapangan usaha bagi sebagian besar pekerja, hambatan-hambatan yang bersifat diskriminatif terhadap pencari kerja di sektor ini perlu dihilangkan, terutama bagi perempuan. Fasilitas dan aturan kerja yang memungkinkan pekerja perempuan untuk bertahan di pasar kerja perlu disediakan dan diterapkan, misal cuti hamil, melahirkan, fasilitas menyusui, dan lain-lain.
2. Rendahnya partisipasi kerja perempuan perlu diteliti dan diidentifikasi permasalahannya sehingga bisa dicarikan solusi. Identifikasi sementara, mereka kesulitan masuk kembali pasar kerja setelah melahirkan. Ketersediaan pengasuh anak dan fasilitas daycare yang terjangkau bisa menjadi alternatif solusi.
3. Fenomena pendidikan berlebih dicarikan perlu solusi dan penyebabnya. Kadangkala pekerja dengan tingkat pendidikan tinggi mendaftar lowongan pekerjaan yang dikhususkan bagi pekerja dengan tingkat pendidikan rendah.
4. Pengangguran pada penduduk berpenghasilan rendah perlu diperbaiki dengan tidak menetapkan syarat-syarat yang memberatkan bagi pencari kerja. Lowongan kerja juga perlu disebarluaskan melalui media yang bisa dijangkau oleh masyarakat ekonomi lemah.
5. Keinginan untuk menurunkan tingkat pengangguran hingga tingkat terendah perlu dibarengi dengan penciptaan nilai tambah yang tinggi. Hambatan tarif dan non tarif perlu diidentifikasi dan dihilangkan secara gradual dan perbaikan infrastruktur perlu terus dilakukan.
6. Maraknya pengangguran muda dan terdidik perlu diikuti dengan usaha memperpendek masa pencarian kerja. Program magang/*internship/on-the-job-training* perlu diimplementasikan dan dievaluasi hasilnya.

Daftar Pustaka

- Allen, Emma R. (2016). *Analysis of Trends and Challenges in The Indonesian Labor Market*. Manila : ADB Papers on Indonesia No.16, Maret 2016
- Badan Pusat Statistik (2018). *Pedoman Pencacah Survei Angkatan Kerja Nasional*. Jakarta : Badan Pusat Statistik
- Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN (tanpa tahun). *Analisis Keberadaan Tradeoff Inflasi dan Pengangguran (Kurva Phillips) di Indonesia*. Diakses dari <http://www.dpr.go.id>, diakses pada 3 Oktober 2019
- Blanchard, Olivier (2017). *Macroeconomics Seventh Edition*. Boston : Pearson Education
- Chowdhury, I, Tadjoeeddin, M.Z, dan Islam, I. (2009). *Indonesia's Employment Challenges: Growth, Structural Change and Labour Market Rigidity*. European Journal of East Asian Studies, Februari 2009
- Chris Manning & P. N. Junankar (1998). *Choosy Youth or Unwanted Youth? A Survey of Unemployment*. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 34:1, 55-93, DOI: 10.1080/00074919812331337280
- Goldin (1995). The U-Shaped Female Labor Force Function in Economic Development and Economic History, *NBER Working Paper Series, no: 4707*
- International Labour Office (2014). *Skills Mismatch in Europe*. Geneva: ILO, 2014.
- International Labour Office (2016). *Key Indicators of the Labour Market, Ninth edition*. Jenewa : International Labour Office
- Irawan, Puguh B., Ahmed, I, Islam, I (2000). *Labour Market Dynamics In Indonesia, Analysis of 18 Key Indicators of the Labour Market (KILM) 1986 – 1999*. Jakarta : ILO
- Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur (2018). *Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Jawa Timur, Agustus 2018*. Surabaya : Divisi Advisory dan Pengembangan Ekonomi Daerah
- Kemnaker dan BPS (2018). *Pengukuran Produktifitas Tenaga Kerja Nasional, Regional, dan Sektorial Tahun 2018*. Jakarta : Kemnaker
- Lewis, W. Arthur (1954). *Economic Development with Unlimited Supplies of Labour*. The Manchester School of Economic and Social, 22, 139-191.
- Myrdal, Gunnar (1968). *Asian drama; an inquiry into the poverty of nations*. New York: Pantheon Books, Twentieth Century Fund
- Priyono, Edy (2015). *Memahami Pasar Tenaga Kerja : Bacaan Ekonomi untuk non Ekonom, cetakan 1*. Jakarta : Pustaka Lentera
- Robinson, Helen dan Wadsworth, Jonathan (2006). *The Impact of the Minimum Wage on the Incidence of Second Job Holding in Britain*. IZA Discussion Paper No. 2445 November 2006

- Sugiyarto, G, Oey-Gardiner, M, dan Triaswati, N (2006). Labor Markets in Indonesia : Key Challenges and Policy Issues. Dalam Felipe, J dan Hasan, R (2006). Labor Markets in Asia : Issues and Perspectives. New York : Palgrave Macmillan
- Udall, Alan T. & Sinclair, Stuart, 1982. "The 'luxury unemployment' hypothesis: A review of recent evidence," *World Development, Elsevier, vol. 10(1)*, pages 49-62, January.

LAMPIRAN



Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007-2018

Indikator	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Penduduk Usia Kerja	1.360.014	1.364.853	1.387.032	1.455.057	1.493.732	1.519.247	1.543.537	1.574.497	1.605.518
Bukan Angkatan Kerja	449.163	440.192	470.826	453.832	445.155	506.957	503.704	504.789	521.999
Angkatan Kerja	910.851	924.661	916.206	1.001.225	1.048.577	1.012.290	1.039.833	1.069.708	1.083.519
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	71,9	67,75	66,06	68,81	70,20	66,63	67,37	67,94	67,49
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,72	11,91	10,19	8,35	8,65	5,37	4,12	3,88	6,3

Uraian	2016	2017	2018
Penduduk Usia Kerja	-	1.666.227	1.696.290
Bukan Angkatan Kerja	-	590.868	601.640
Angkatan Kerja	-	1.075.359	1.094.650
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	-	64,54	64,53
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	-	4,97	4,73

Keterangan : Sakernas Tahun 2016 tidak diadakan

Penduduk menurut Kegiatan Utama Seminggu Yang Lalu, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007-2018

Indikator	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Bekerja	795.443	814.503	822.862	917.622	957.899	957.887	996.960	1.028.243	1.015.208
Menganggur	115.408	110.158	93.344	83.603	90.678	54.403	42.873	41.465	68.311
Sekolah	120.343	119.954	129.403	131.383	149.134	145.222	186.250	172.529	156.493
Mengurus Rumahtangga	260.876	258.865	270.656	260.854	238.525	291.680	238.898	272.147	306.776
Lainnya	67.944	61.373	70.767	61.516	57.496	70.055	78.556	60.113	58.730

Uraian	2016	2017	2018
Bekerja	-	1.021.884	1.042.877
Menganggur	-	53.475	51.773
Sekolah	-	195.474	208.827
Mengurus Rumahtangga	-	329.521	340.437
Lainnya	-	65.923	52.376

Keterangan : Sakernas Tahun 2016 tidak diadakan

Pekerja berdasarkan Status Pekerjaan Seminggu Yang Lalu, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008-2018

Indikator	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Berusaha Sendiri	157.732	188.290	186.148	128.851	122.117	125.430	139.222	112.682
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Tak Dibayar	106.976	89.663	99.316	102.667	61.430	74.338	68.651	88.669
Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Dibayar	22.511	19.387	24.819	21.260	26.055	28.141	51.757	28.714
Buruh/ Karyawan/ Pegawai	422.832	409.097	488.587	574.448	632.714	645.822	668.672	662.097
Pekerja Bebas di Pertanian	27.778	32.354	28.433	22.264	18.097	7.038	9.556	10.546
Pekerja Bebas di Non-Pertanian	28.395	37.285	29.788	48.922	48.239	53.524	45.070	63.922
Pekerja Keluarga/Tak Dibayar	48.279	46.766	60.531	59.487	49.235	62.667	45.315	48.578

Uraian	2016	2017	2018
Berusaha Sendiri	-	166.535	187.023
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Tak Dibayar	-	40.872	52.911
Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Dibayar	-	21.388	27.553
Buruh/ Karyawan/ Pegawai	-	676.900	683.049
Pekerja Bebas di Pertanian	-	14.800	14.208
Pekerja Bebas di Non-Pertanian		47.522	36.135
Pekerja Keluarga/Tak Dibayar		53.867	41.998

Keterangan : Sakernas Tahun 2016 tidak diadakan

Pekerja berdasarkan Tingkat Pendidikan, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008-2018

Indikator	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
≤ SD	250.193	260.414	268.592	378.150	390.445	334.931	334.936	181.722
SMP	194.971	170.307	213.012	372.647	352.425	352.007	344.998	183.278
SMA	299.238	326.384	361.540	593.318	592.245	649.346	662.648	493.815
≥ Diploma	70.101	65.757	74.478	149.617	184.132	207.253	231.915	156.393

Uraian	2016	2017	2018
≤ SD	-	167.635	144.075
SMP	-	160.398	177.936
SMA	-	481.841	509.509
≥ Diploma	-	212.010	211.357

Keterangan : Sakernas Tahun 2016 tidak diadakan